STUDI KORELASI ANTARA KESENJANGAN GENDER TERHADAP INDEKS DEMOKRASI DI FILIPINA PADA TAHUN 2010 - 2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:

NISA' AN NASHR

NIM. I02215007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

MEI 2019

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	:	Nisa'An Nashr
NIM	:	I022150007
Pogram Studi	:	Hubungan Internasional
Judul Skripsi	:	Studi Korelasi antara Kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina pada Tahun 2010 - 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 15 April 2019

g menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
F9E7AAFF618194775
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nisa' An Nashr
NIM I02215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Nisa' An Nashr
NIM	: I02215007
Pogram Studi	: Hubungan Internasional

yang berjudul; "Studi Korelasi antara Kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina pada Tahun 2010 - 2018" saya berpendapat bahwa skripsi ini telah direvisi dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP, MA
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nisa' An Nashr dengan judul: **"Studi Korelasi antara Kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina pada Tahun 2010 - 2018"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim penguji skripsi pada tanggal 11 April 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP.,MA
NIP 198408232015031002

Penguji II

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP 198401052011011008

Penguji III

Zaky Ismail, M.S.I
NIP 198212302011011007

Penguji IV

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int.,M.A.
NIP 199003252018012001

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzzaki, M. Ag, Grad, Dip, SEA, M Phil, ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nisa' An Nashr
NIM	: I02215007
Fakultas/Jurusan	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ HI
E-mail address	: nissaaniss25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KORELASI ANTARA KESENJANGAN GENDER TERHADAP INDEKS DEMOKRASI DI FILIPINA PADA TAHUN 2010 - 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis

(Nisa' An Nashr)

ABSTRAK

Nisa' An Nashr, 2019, *Studi Korelasi Antara Kesenjangan Gender Terhadap Indeks Demokrasi di Filipina pada Tahun 2010 - 2019,* Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci : Filipina, Kesenjangan Gender, Indeks Demokrasi, Feminisme

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di Filipina pada Tahun 2010 - 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rumusan masalah bersifat koreksional. Penelitian ini juga termasuk perbadingan politik berjenis *single country studies* dengan unit (n) yang dibandingkan di dalam suatu negara (*within unit variations*) dari tahun 2010 hingga 2018 (*across period of time*). Variabel dalam penelitian ini adalah kesenjangan gender (X) dengan indikator partisipasi ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik dan indeks demokrasi (Y) dengan indikator pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah matang (*secondary data*) dari dua instansi, yakni *World Economy Forum* (WEF) dan *Economist Intelligence Unit* (EIU). Adapun alat uji statistik yang digunakan adalah korelasi Pearson (*product moment*) dan arah korelasi (T-area). Penelitian ini menyimpulkan adanya hubungan positif antara kesenjangan gender terhadap indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 - 2019 dengan koefisien korelasi sebesar 0,792. Variasi kesenjangan gender memberikan kontribusi terhadap indeks demokrasi sebesar 62,41% pada taraf signifikan α=0,05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Nisa 'An Nashr, 2019, The Correlation Study Between Gender Gaps with The Democracy Index in Philippines, Thesis International Relations Study Program Social and Political Sciences Faculty in UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Philippines, Gender Gap, Democracy Index, Fenimism

This study aims to determine the relationship between gender disparities and the index of democracy in the Philippines. This study uses a quantitative approach with the formulation of a problem that is corrective. This study also included single country studies of political comparison with units (n) compared to within unit variations from 2010 to 2018 (across period of time). The variables in this study are gender gaps (X) and democracy index (Y). Data collection is done by utilizing data that is mature (secondary data) from two agencies, namely the World Economy Foru4m (WEF) and the Economist Intelligence Unit (EIU). The statistical test tool used is Pearson correlation (product moment). This study concludes that there is a positive relationship between gender disparities in the democracy index in the Philippines with a correlation coefficient of 0.792. Variations in gender inequality contributed to the democracy index by 62.41% at a significant level of $\alpha = 0.05$.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI vii

ABSTRAK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan Skripsi 10

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Konseptual 12

1. Kesenjangan Gender 12

2. Indeks Demokrasi 40

B. Kerangka Teoritik 53

Feminimisme Liberal 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Representasi Politik dan Demokrasi Liberatif 55

Feminisme dalam Islam 59

C. Kajian Terdahulu 61

D. Hipotesis Penelitian 63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 65

B. Tempat dan Waktu Penelitian 66

C. Sumber Data 67

D. Deskripsi Sumber Data 67

a. The WEF (World Economic Forum) 67

1. Sejarah *The WEF (World Economic Forum)* 67

2. Misi *The WEF (World Economic Forum)* 71

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 72

4. Anggota *The WEF (World Economic Forum)* 74

5. Manfaat *The WEF (World Economic Forum)* 78

6. Alamat Kantor 79

b. The EIU (The Economist Intelegency Unit) 79

1. Tentang *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* 79

2. Analis *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* 81

3. Jaringan Negara *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* 82

4. Bidang Spesialis *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* ... 84

5. Bahas Yang Dikuasai *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* 83

6. Alamat Kantor *The EIU (The Economist Intelegency Unit)* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Sampling 84

F. Variabel 85

G. Metode Pengumpulan Data 86

H. Teknik Analisis Data Penelitian 86

I. Hipotesa 90

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Data 91

1. Variabel Kesenjangan Gender 91

2. Variabel Indeks Demokrasi 93

B. Pengujian Persyaratan Analis 95

C. Uji Hipotesis 102

D. Pembahasan Hasil Penelitian 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 106

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 108

INDEKS 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Filipina adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia dengan jumlah penduduk yang banyak berjumlah sekitar 101,716,359 yakni dengan peningkatan 1,65 % pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 berjumlah 103,320,222 dengan peningkatan sekitar 1,58 %. Kemudian, pada tahun 2017 berjumlah sekitar 104,918,090 dengan adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1,55 %. Diantara tahun 2015 – 2017 tersebut, selama 2 tahun Filipina menduduki peringkat ke 12 dengan kategori jumlah penduduk terbanyak sedunia dan pada tahun 2017 menduduki peringkat ke 13 sedunia. Hal ini menjadikan bahwa Filipina adalah salah satu negara dengan kondisi populasi penduduk yang banyak.[1]

Filipina selain mengungguli populasi yang banyak, ia juga menjadi salah satu negara yang dapat mempertahankan dalam tingkat kesetaraan gender yang tinggi, ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan gender yang sangat rendah di Filipina. Bahkan pada tahun 2017, negara Filipina dapat mempertahankan statusnya sebagai negara yang paling minim dalam kesenjangan gender (gender Gap) di Asia. Negara ini mendapatkan skor setelah

[1] Worldometers, "Population of the Philippines (2019 and historical) ",http://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/, di akses 24 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringkat Selandia Baru. Selandia Baru mendapat skor 0,791 sementara Filipina mengikuti di tempat kedua dengan 0,790. Sehingga, jika dalam kawasan Asia Tenggara Filipina menjadi salah satu pedoman di kawasan dalam segi minim nya kesenjangan gender.

Penilaian WEF *(World Economy Forum)* dalam melihat adanya kesenjangan gender berdasarkan empat kategori sub indeks yakni pendidikan, kesehatan, peluang dan partisipasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yakni partisipasi dalam politik atau kursi pemerintahan. Filipina dapat mempertahankan dua tahun terakhir pada 2015 dan 2016 dengan menduduki peringkat ke 7 dalam kesenjangan gender (gender Gap) yang di rilis oleh WEF.[2] Sedangkan pada tahun 2017 ini, Filipina menduduki peringkat kesepuluh. Meskipun, adanya penurunan tingkat namun tak bisa di pungkiri bahwa Filipina dapat menduduki sebagai negara yang wajib di contoh dalam mengurangi kesenjangan se Asia Tenggara bahkan se Benua Asia.[3]

Filipina patut dicontoh dalam mengurangi kesenjangan gender se Asia pada akhir tahun 2014, bisa dilihat dari segi peluang dan partisipasi ekonomi bidang bisnis. Filipina menduduki peringkat pertama untuk proporsi wanita yang memegang peran manajemen se Asia Tenggara, dan kelima secara global, dengan proporsi 37% dari peran tersebut diduduki oleh wanita. Selain itu, 34%

[2] Jee Y Geeronemo, "*PH still among 10 most gender-equal nations"*, https://www.rappler.com/nation/150307-ph-global-gender-gap-report-2016, di akses 10 Desember 2018

[3] WEF, "*The Global Gender Gap Report 2017*" (Switzerland: 2017), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan perusahaan di Filipina adalah perempuan, yang mana sangat jauh melebihi rata-rata global yakni 19%.[4]

Terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa Filipina wajib diteladani dalam perihal kesenjangan gender: dalam dunia pemerintahan Magna Carta pada tahun 2009 telah menduduki kursi pemerintahan legislatif dan adanya kuota dalam beberapa pemilihan umum atau mendaftarkan diri menjadi calon kandidat, dalam dunia perkonomian banyak sekali para perempuan yang menduduki kursi manager bahkan pimpinan perusahaan, bahkan beberapa organisasi atau sebuah kumpulan dan komunitas yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Ini dapat membuktikan bahwa perempuan di Filipina sangat dihargai dan diberi peluang yang cukup memadai sehingga kesenjangan gender yang sangat minim sekali.[5]

Pada tahun 2015, Filipina meraih peringkat ke 7 di antara sepuluh negara yang mempunyai kesenjangan yang sangat rendah yakni mendekati dalam kategori kesetaraan gender. Diantara sepuluh negara tersebut ialah, Islandia (1), Norway (2), Finlandia (3), Swedia (4), Irlandia (5), Rwanda (6), Filipina (7), Switzerland (8), Slovenia (9) dan Selandia Baru (10).[6] Sehingga rendahnya kesenjangan yang terjadi di Filipina ini mengartikan bahwa semakin meningkatnya kesetaraan gender di Filipina.

Filipina, selain negara yang dikenal dengan kesenjangan gender nya yang rendah. Ia memiliki status negara dengan demokrasi yang rendah. Ini bisa

[4] Michael daniels, "The Gender *Gap*: *What Asia Can Learn From The Philippines"*, https://hcli.org/articles/gender-gap-what-asia-can-learn-philippines, di akses 9 Desmber 2018

[5] Daniels, "The Gender *Gap"*, https://hcli.org/articles/gender-gap-what-asia-can-learn-philippines, di akses 10 Desmber 2018

[6] WEF, "*The Global Gender Gap Report 2017*" (Switzerland: 2015), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan pada penelitian milik *Economic Intelegency Unit* (Unit Intelijen Ekonomi) yang menyatakan bahwa Filipina mendapatkan peringkat 54 di antara 167 negara di dunia dengan kategori flawed democracy (demokrasi rendah) pada tahun 2015.[7] Penelitian tersebut memberikan penilaian pada demokrasi yang terbagi dalam lima indikator yakni, pluralism, fungsi dari pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.[8]

Rendahnya demokrasi di Filipina di kategorikan pada negara-negara yang memiliki pemilu bebas dan adil bahkan menghormati adanya kebebasan pers dan kebebasan sipil. Namun, terdapat kelemahan yang sangat signifikan dari demokrasi, yakni permasalahan dalam pemerintahan, sebuah budaya politik yang belum berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik.[9]

Lebih dari satu dekade yang lalu, Filipina adalah penyongsong demokrasi Asia Tenggara. Secara teknis, Filipina telah memiliki semua perangkat demokratis yang ditentukan, seperti kongres dan mekanisme untuk partisipasi rakyat, dari tingkat nasional hingga lokal. Pemilihan umum yang bebas telah menjadi model untuk memilih pemimpin pemerintahan mereka sejak tahun 1946. Namun, semenjak tahun 1922 hingga sekarang Filipina terperosot demokrasinya. Seperti penelitian milik David Timberman, dalam penelitian nya ia menulis dengan judul buku, "*A Changeless Land: Continuity and Change in Philippine Politics"*. Dalam penelitian David ia mengatakan bahwa "meskipun ada perubahan dalam bentuk pemerintahan dari otoriter ke demokrasi pada tahun 1986, politik Filipina terperosok ke dalam pola-pola

[7] EIU, "*Democracy Index 2015 Democracy In An Age Of Anxiety"*, 6
[8] EIU, "*Democracy"*, 43
[9] EIU, 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan korup yang kejam, elektoral penipuan dan kemiskinan", bahkan hingga saat ini.[10] Sehingga, sekitar 25,2 % masyarkat Filipina masih hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 2016, terdapat peningkatan rangking demokrasi Filipina yang mana pada tahun 2015 peringkat 54, pada tahun 2016 menjadi peringkat 50. Meskipun terdapat peningkatan dalam 4 digit, namun tetap saja Filipina masih menduduki pada *flawed democracy* (demokrasi rendah).[11] Dengan nilai skor keseluruhan 6,94 dan jika diperincikan dari segi pluraslime Filipina sangat baik yakni 9,17 dari segi fungsi pemerintahan cukup buruk yakni 5,71 dari segi partispasi politik cukup baik yakni 7,22 dari budaya politik sangat memburuk yakni 4,38 dan yang terakhir dari kebebasan sipil yakni 8,24.[12]

Tahun 2017, Filipina mengalami kemerosotan satu digit menjadi peringkat ke 51 di antara 167 negara. Dengan mendapatkan nilai keseluruhan sebesar 6,71. Beberapa indikator yang telah disebutkan salah satunya adalah kekebebasan sipil, kebebasan sipil ini dapat digambarkan berupa kebebasan dalam bermedia. Filipina mendapatkan skor 7 dalam kategori ini dan jika diartikan yakni *partly free* (setengah bebas).[13]

---

[10] David G Timberman, , "*A Changeless Land: Continuity and Change in Philippine Politics*" (M.E. Sharpe: 1991), 27, https://www.worldcat.org/title/changeless-land-continuity-and-change-in-philippine-politics/oclc/1031486222, di akses 12 Desember 2018

[11] EIU, "*Democracy Index 2016 Revenge Of The "Deplorables* ", 10

[12] EIU, "*Democracy",*10

[13] EIU, "*Democracy Index 2017 Free Speech Under Attack"*, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2015 dijadikan salah satu sorotan dalam penelitian karena, Filipina menjadi salah satu negara terbaik di Asia dalam perihal kesenjangan gender. Menurut Laporan Kesenjangan Gender Dunia (Global Gender Gap tahun 2015) Filipina berada di peringkat kesembilan di dunia dalam hal kesetaraan gender dan merupakan satu-satunya negara Asia (kecuali Selandia Baru dan Australia) di peringkat 50 besar dunia. Itu juga peringkat teratas negara di dunia dalam hal pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup perempuan. Perempuan juga lebih terwakili dalam bisnis di Filipina daripada di negara-negara tetangga. Dalam sebuah laporan baru-baru ini oleh perusahaan jasa profesional global, Grant Thornton, Filipina menempati peringkat pertama untuk proporsi perempuan yang memegang peran manajemen senior di Asia Tenggara, dan kelima secara global, dengan 37% peran tersebut ditempati oleh perempuan. Selain itu, wanita terdiri dari rata-rata 34% dewan perusahaan di Filipina, jauh melebihi rata-rata global sebesar 19%.[14] Begitu juga selama tiga tahun dari 2015-2017, Filipina dapat mempertahankan kedudukan peringkat sebagai negara yang terbaik se Asia semenjak tahun 2015.

Ketika tahun 2015 pula demokrasi yang dimiliki Filipina mengalami kemerosotan hingga menjadi kategori negara demokrasi yang rendah (*flawed democracy*) yakni dengan peringkat 54 di antara 167 negara di dunia.[15] Bahkan selama 2015-2017 demokrasi tetap dalam status negara dengan kategori negara

[14] Daniels, "The Gender *Gap"*, https://hcli.org/articles/gender-gap-what-asia-can-learn-philippines, di akses 10 Desmber 2018

[15] EIU, "*Democracy Index 2015 Democracy In An Age Of Anxiety"*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi yang rendah. Meskipun negara terdapat kemajuan menjadi peringkat ke 50 pada tahun 2016 namun kategori negara dengan demokrasi rendah masih terwakilkan oleh Filipina. Ini bisa menjadi cerminan selama 3 tahun berlangsung negara Filipina menjadi negara dengan kategori demokrasi yang rendah. Dan yang menjadi tolak ukur kemerosotan nya demokrasi yakni pada dua indicator, fungsi pemerintahan dan budaya politik yang belum berkembang dengan baik.

Kesenjangan gender mempunyai keterikatan dengan demokrasi. Menurut Michelle Bachelet, Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif Wanita PBB, beliau sempat berpidato mengenai "*Democracy and Gender Equality Roundtable*" di Markas Besar PBB, New York[16] pada tanggal 4 Mei 2011. Beliau mengatakan bahwa demokrasi menjadi salah satu gelombang perubahan terbesar ke empat setelah adanya *Arab Spring* yang melanda kawasan Timur Tengah. Sehingga, secara otomatis perempuan mendapatkan sebuah hak dan tuntutan dalam kebebasan dan martabat politik dengan maksud kesetaraan gender juga menjadi bagian demokrasi.

Melihat salah satu persitiwa yang terjadi tersebut mengingatkan akan adanya demokrasi yang fundamental terhadap kaum adam kini mempunyai hak kesetaraan tanpa adanya kesenjangan terhadap kaum hawa. Dan Tentu saja hal ini harus didorong oleh kepemimpinan dan komitmen oleh pemerintah untuk memastikan partisipasi penuh dan setara terhadap perempuan dalam proses

[16] Un Women, *Democracy and Gender Equality*, http://www.unwomen.org/en/news/astories/2011/5/democracy-and-gender-equality, di akses 9 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi. Seiring berjalannya demokrasi, sebagai sistem politik, kini telah mengembangkan mekanisme untuk mengintegrasikan berdasarkan kelompok marjinal seperti kuota atau pengaturan regional untuk memperkuat kekuatan politik sehingga terjadinya kekhawatiran suatu kelompok terhadap kehilangan hak politik. Perempuan sering berada di mayoritas populasi, namun mereka menghadapi berbagai kesenjangan terhadap partisipasi yang efektif bahkan dalam bentuk demokrasi yang paling dasar, seperti pemungutan suara, atau mencalonkan diri untuk menjabat dalam politik.

Hubungan antara demokrasi dan kesenjangan gender tersebut. Michelle Bachelet, membuat suatu pernyataan terhadap keterikatan antara dua variabel yang berbeda dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Akan tetapi pada negara Filipina ini, terdapat data yang menunjukkan kesenjangan gender yang terbilang sangat rendah, tetapi demokrasi yang dimiliki Filipina cukup buruk bahkan masuk ke peringkat 50 di antara semua negara di dunia. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di Filipina berbanding terbalik dengan demokrasi dan tidak sesuai dengan teori sebagaimana yang disampaikan oleh Michelle Bachelet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di Filiphina pada tahun 2010 - 2018?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di filiphina pada tahun 2010 - 2018. Karena, jika dilihat dari dari data kesenjangan gender (gender Gap) di Filipina memasuki peringkat 10 besar akan tetapi indeks demokrasinya rendah dengan peringkat 50 besar di antara 163 negara di dunia.

D. Manfaat penelitian

Selain untuk menambah wawasan intelektual penulis, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat baik secara akademis maupun praktis:

a. Secara akademis

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya dan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan ilmiah tentang studi korelasi kesenjangan gender dengan demokrasi di Filiphina. Serta diharapkan juga sebagai rujukan ilmiah terkait dengan judul skripsi tersebut.

b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan koreksian terhadap pemerintahan yang bersangkutan yakni Filipina, bahwa adanya demokrasi yang tinggi dan baik bukan hanya didapatkan pada rendahnya kesenjangan gender saja, namun juga dari beberapa aspek seperti budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang dijalankan, fungsi dari pemerintahan itu sendiri, adanya pluralisme dan kebebasan hak sipil.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, dan pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis. Adapun rancangan sistematika skripsi ini adalah:

BAB I - Pendahuluan

Dalam penyajian penulisan pada bab ini berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – Kajian Teori

Penelitian pada bab ini berisi kerangka konseptual, kemudian kajian teoritik yang membahas akar permasalahan dan subab-subab dari dua variabel yaitu kesenjangan gender dan demokrasi, dengan mendefinisikan secara operasional dua variabel tersebut dilanjutkan dengan kajian terdahulu dan di akhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III – Metode Penelitian

Mengkaji tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, deskripsi sumber data, teknik sampling, variabel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan yang terakhir hipotesa.

BAB IV – Penyajian dan Analisa Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab ini berisi tentang penyajian data yang dipaparkan sesuai dengan data yang diperoleh dari dua instansi (WEF dan EIU) yang telah dianalisa. Kemudian, dilanjutkan pembahasan berdasarkan hasil penyajian data yang secara rinci. Kemudian, dilakukan analisis data berdasarkan teori yang telah di gunakan pada bab sebelumnya.

BAB V – Penutup

Merupakan penutup meliputi: kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian, demi keberhasilan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu definisi yang mengoperasikan beberapa konsep terhadap suatu variabel yang saling berkaitan dan digunakan sebagai pendekatan dan landasan dalam memecahkan suatu permasalahan.[1] Dalam hal ini penulis membuat kerangka konseptual secara teoritis tentang variabel penelitian yaitu variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*depedent*).[2]

1. Kesenjangann Gender

Mansoer Fakih berpendapat bahwa gender adalah sebuah:

> ”sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.[3]

Definisi dari gender adalah berupa sifat atau karakter maskulin dan feminine yang mana kedua sifat tersebut muncul pada dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan.[4] Diperjelaskan bahwa tidak semua manusia yang kelamin laki-laki mempunyai identik dengan maskulin, namun juga dapat

[1] Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 14

[2] Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* , 58

[3] Athiqoh Nur Alami, “*Mengapa Gender Menjadi Isu Penting dalam Hubungan Internasional?”,* http://www.politik.lipi.go.id/kolom/176-mengapa-gender-menjadi-isu-penting-dalam-hubungan-internasional,

[4] Athiqoh Nur Alami, “*Mengapa Gender Menjadi Isu Penting dalam Hubungan Internasional”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai karakter dan sifat yang feminine. Selain itu, definisi tersebut juga menegaskan bahwa gender adalah suatu produk dari konstruksi sosial budaya. Hal ini berarti konsepsi tentang gender dapat berbeda antar kelompok masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 1920an, konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (*differences*) antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya berupa personal.[5] Pada masa ini konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis. Perbedaan karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan menciptakan konstruksi peran dan fungsi sosial tertentu serta perilaku yang seharusnya ada atau melekat pada laki-laki atau perempuan. Akibatnya, jenis kelamin adalah bentuk personalitas yang menghasilkan perbedaan peran sosial dan menentukan pembagian kerja yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa memahami gender sebagai ”perbedaan” bukan hanya terkait dengan hubungan personal tapi juga struktur sosial karena perbedaan gender telah melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang lebih menghargai laki-laki daripada perempuan. Penyebab mengapa karakter maskulin mendapat nilai atau status yang lebih tinggi daripada karakter feminin tidak hanya terkait dengan fakta perbedaan biologis tapi juga karena faktor struktur sosial yang menstrukturkan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Pada tahap inilah perbedaan gender telah menciptakan

[5] Athiqoh Nur Alami, “*Mengapa Gender Menjadi Isu…”,* http://www.politik.lipi.go.id/kolom/176-mengapa-gender-menjadi-isu-penting-dalam-hubungan-internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) dalam sistem ekonomi, sosial dan politik. Ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelamin kian menjadi persoalan ketika hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender.

Kesenjangan jika diartikan adalah sebuah perbedaan yang tidak seimbang atau disparitas terhadap kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan.[6] Perbedaan tersebut bukanlah hasil dari bentuk biologis terhadap kelamin, namun sebuah kontruksi sosial dan pengaruh lingkungan terhadapnya. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersosial berdasarkan perbedaan dalam perspektif individu (perbedaan hampir selalu menguntungkan laki-laki) misalnya, kesenjangan gender dalam pendidikan yakni mengacu pada banyaknya kesempatan dan prestasi pendidikan yang lebih baik untuk laki-laki daripada perempuan di sebagian besar masyarakat.

Dalam mengoperasikan konsep kesenjangan gender ini, penulis menggunakan pandangan lembaga institusi WEF (*World Economy Forum*), dikarenakan data yang diambil dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder yang telah diolah oleh lembaga tersebut. Terdapat tiga konsep dasar yang mendasari *Global Gender Gap* dalam mengukur dan mengoperasionalkan indeks dengan membentuk dasar bagaimana indikator dipilih, bagaimana data diolah dan skala pengukuran yang digunakan. *Pertama*, Indeks fokus pada pengukuran kesenjangan daripada level. *Kedua*,

[6] Athiqoh Nur Alami, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/176-mengapa-gender-menjadi-isu-penting-dalam-hubungan-internasional,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia melihat kesenjangan dalam hasil variabel daripada kesenjangan dalam variabel input. *Ketiga*, pemberian peringkat negara berdasarkan data kesetaraan gender yang ada di negara tersebut daripada tingkat pemberdayaan perempuannya.[7] Ketiga konsep dasar tersebut yakni;

1- Kesenjangan dan tingkat (level)

Indeks ini dirancang untuk mengukur kesenjangan berbasis gender dalam akses ke sumber daya dan peluang di negara-negara daripada tingkat sumber daya yang tersedia dan peluang dalam melakukan adanya pemberdayaan di negara-negara tersebut. Dengan kata lain, Indeks disusun untuk memberi peringkat pada negara-negara berdasarkan kesenjangan gender dan bukan pada tingkat pembangunan dan pemberdayaan gender di negara mereka.[8]

Sebagai contoh, negara-negara maju secara umum dapat menawarkan lebih banyak kesempatan dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan kepada semua masyarakatnya. Meskipun negara-negara tersebut dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan dan pemberdayaan pada gender, tidak menutup kemungkinan terdapat sebuah pembatasan dalam pastisipasi yang di berikan. Sehingga dalam mengoperasionalkan disini bukan berdasarkan pada tingkat kemajuan (adanya pemberdayaan dan pembangunan) namun akses yang dimiliki semakin kecil kesenjangan semakin bagus negara tersebut dalam melaksanakan kesetaraan gender nya.

[7] WEF, " *The Global Gender Gap Report 2017,* (Switzerland: 2017)", 14
[8] WEF, " *The Global Gender Gap Report 2017,*14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2- Hasil dan input (sarana)

Konsep dasar kedua yang mendasari Kesenjangan Gender adalah mengevaluasi negara berdasarkan hasil bukan input atau sarana.[9] Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran posisi laki-laki dan perempuan terkait dengan beberapa indikator hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik. Misalnya, dalam memberikan indikator dengan tidak membandingkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di posisi pekerjaan ysng membutuhkan keterampilan tinggi seperti legislator, pejabat senior dan manajer. Sehingga, data yang diberikan adalah dasar yang paling objektif untuk faktor kontekstual.

3- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Yang ketiga yakni dalam pemberian peringkat pada negara-negara berdasarkan kesetaraan gender yang dimiliki negara tersebut dan bukan dari banyaknya sarana fasilitas pemberdayaan perempuan. Dengan tujuan agar fokus, apakah masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam indikator yang telah dijadikan indeks. Oleh karena itu, adanya suatu peringkat tersebut dapat memberikan penilaian kepada negara-negara yang telah mencapai adanya kesetaraan gender.[10]

a. Subindex Kesenjangan Gender

Dalam pembagian ke beberapa subindeks, penulis mengkategorikannya sesuai dengan data milik WEF, karena data yang

[9] WEF, 15
[10] WEF, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan penelitian adalah data kepemilikan lembaga tersebut. Adapun beberapa subindeks tersebut, yaitu: pendidikan, kesehatan, peluang dan partisipasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yakni partisipasi dalam politik atau kursi pemerintahan.[11]

1) Peluang dan partisipasi dalam bidang ekonomi

Partisipasi dalam bidang ekonomi berisi tiga konsep: jeda partisipasi, kesenjangan dalam penggajian dan adanya kemajuan dalam kesenjangan. Kesenjangan partisipasi menggunakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesenjangan remunersi atau penggajian berdasarkan (rasio perkiraan pendapatan perempuan per orang) dan indikator kualitatif yang dikumpulkan melalui Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa). Kesenjangan antara kemajuan perempuan dan laki-laki didapatkan melalui dua data statistik keras (rasio perempuan terhadap laki-laki di antara legislator, pejabat senior dan manajer, dan rasio perempuan terhadap laki-laki di antara pekerja teknis dan profesional).[12]

2) Pendidikan

Subindex ini berdasarkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki mengakses dalam bidang pendidikan, yakni rasio perempuan dan laki-laki dalam menempuh pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Dalam pendidikan ini pandangan jangka panjang tentang kemampuan negara untuk mendidik perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama

[11] WEF, 15
[12] WEF, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan melalui rasio tingkat melek huruf perempuan terhadap tingkat melek huruf laki-laki.[13]

3) Kesehatan

Subindex ini memberikan ikhtisar tentang perbedaan antara kesehatan wanita dan pria melalui dua indikator. Yang pertama adalah rasio jenis kelamin saat lahir, yang bertujuan khusus untuk menangkap fenomena "wanita yang hilang", karena banyak negara dengan preferensi anak perempuan yang tidak diinginkan atau sebagai aib di keluarga atau pemerintah. Kedua, yakni menggunakan kesenjangan antara harapan hidup sehat wanita dan pria. Langkah ini memberikan perkiraan jumlah tahun yang dapat diharapkan oleh perempuan dan laki-laki untuk hidup sehat dengan mempertimbangkan akibat kekerasan, penyakit, kekurangan gizi dan faktor-faktor yang relevan lainnya.[14]

4) Pemberdayaan Politik

Subindex ini mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat tertinggi pengambilan keputusan politik melalui rasio perempuan terhadap laki-laki dalam posisi menteri dan rasio perempuan terhadap laki-laki dalam posisi parlemen.[15] Selain itu, dalam memasukkan rasio wanita ke pria dalam pencapaian menjadi bagian dari eksekutif (perdana menteri atau presiden) selama 50 tahun terakhir.

[13] WEF, 15
[14] WEF, 15
[15] WEF, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1 menampilkan keempat subindeks ini dan 14 indikator berbeda yang menyusunnya, bersama dengan sumber data yang digunakan untuk masing-masing tahun yang digunakan. Contoh tabel di bawah adalah hasil dari pengolahan tahun 2017.

Subindex	Variable	Source
Economic Participation and Opportunity	Ratio: female labour force participation over male value	International Labour Organization, *ILOSTAT* database, 2016 or latest available data
	Wage equality between women and men for similar work (survey data, normalized on a 0-to-1 scale)	World Economic Forum, *Executive Opinion Survey (EOS), 2016-17*
	Ratio: female estimated earned income over male value	World Economic Forum calculations based on the United Nations Development Programme methodology (refer to

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Human Development Report 2007/2008)
	Ratio: female legislators, senior officials and managers over male value	International Labour Organization, *ILOSTAT* database, 2016 or latest available data
	Ratio: Female professional and technical workers over male value	International Labour Organization, *ILOSTAT* database, 2016 or latest available data
Educational Attainment	Ratio: female literacy rate over male value	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics, *Education indicators*, database, 2016 or latest available data
	Ratio: female net primary enrolment rate over male value	UNESCO Institute for Statistics, *Education indicators*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		database, 2016 or latest available data
	Ratio: female net secondary enrolment rate over male value	UNESCO Institute for Statistics, *Education indicators* database, 2016 or latest available data
	Ratio: female gross tertiary enrolment ratio over male value	UNESCO Institute for Statistics, *Education indicators* database, 2016 or latest available data
Health and Survival	Sex ratio at birth (converted to female-over-male ratio)	United Nations Population Division, *World Population Prospects*, 2016 or latest available data
	Ratio: female healthy life expectancy over male value	World Health Organization, *Global Health Observatory* database, 2015 or latest

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		available data
Political Empowerment	Ratio: females with seats in parliament over male value	Inter-Parliamentary Union, *Women in Politics: 2017*, reflecting elections/appointments up to 1 June 2017
	Ratio: females at ministerial level over male value	Inter-Parliamentary Union, *Women in Politics: 2017*, reflecting appointments up to 1 January 2017
	Ratio: number of years with a female head of state (last 50 years) over male value	World Economic Forum calculations, reflecting situation as of 30 June 2017

Sumber: *Structure of the Global Gender Gap Index 2017*.[16]

b. Mengkonstruksi Indeks

Keseluruhan Indeks Kesenjangan Gender Global diolah dengan empat langkah proses. Pertama yakni mengkonversikan data menjadi bentuk

[16] WEF, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasio, kedua yakni mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang ketiga yakni menghitung skor sub indeks, yang keempat yakni menghitung hasil skor akhir.[17] Adapun cara mengoperasionalkan nya akan dijelaskan di bawah ini:

1. Konversikan ke rasio

Awalnya, semua data dikonversi ke dalam bentuk data rasio antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, sebuah negara dengan 20% wanita dalam posisi menjabat sebagai menteri diberi rasio 20 wanita dan 80 pria, dengan demikian nilai 0,25 adalah nilai daripada variabel/indeks tersebut.[18] Adapun, pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa indeks ini dapat melihat angka kesenjangan antara tingkat pencapaian posisi perempuan dan laki-laki.

2. Menghitung data pada tolak ukur kesetaraan

Sebagai langkah yang kedua, rasio ini berpacu pada "tolak ukur kesetaraan" yakni mulai dalam mengukur suatu kesetaraan. Ketika mulai adanya perhitungan ini berlaku pada semua indikator, kecuali dua indicator pada indeks kesehatan, tolak ukur kesetaraan pada kesehatan ini bernilai 1, yang berarti jumlah perempuan dan laki-laki yang sama (setara dalam kesehatan). Dalam perhitungan rasio jenis kelamin saat lahir, tolak ukur kesetaraan ditetapkan dengan angka 0,944 sedangkan dalam hal

[17] WEF, 15
[18] WEF, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan hidup sehat, tolok ukur kesetaraan ditetapkan pada 1,06.[19] Adapun menghitung data di tolak ukur kesetaraan digunakan ketika memberikan skor yang sama ke negara yang telah mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan pria begitu juga ketika wanita telah mendapatkan fasilitas yang melampaui pria.

Jenis skala peringkat yang dipilih ini dapat menentukan apakah Indeks ini telah melakukan adanya pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender. Untuk mendapatkan kesetaraan gender terdapat dua skala yang dipertimbangkan. Pertama adalah skala negatif-positif yang megukur ke arah kesenjangan gender. Skala ini melihat keuntungan laki-laki atas perempuan atau keuntungan wanita atas laki-laki, dan yang pasti memberikan poin tertinggi untuk kesetaraan gender yang secara absolut. Pilihan kedua adalah skala satu sisi yang mengukur seberapa dekat perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki, tetapi masih memiliki kesenjangan gender di arah lain. Dan dari WEF sendiri menjadikan menemukan skala satu sisi ini lebih sesuai untuk di jadikan penelitian, karena melampaui patokan paritas. Namun, tetap saja perbedaan di kedua arah skala akan tercatat di tiap profil Negara.

3. Menghitung skor subindeks

Langkah ketiga dalam proses ini menghitung rata-rata dari indikator dalam setiap subindex untuk membuat skor subindex. Rata-rata indikator

[19] WEF, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda secara implisit akan memberikan bobot lebih pada ukuran yang menunjukkan variabilitas terbesar atau standar deviasi. Karena itu pertama-tama yang dilakukan adalah menormalkan indikator dengan menyamakannya standar deviasi. Misalnya, dalam subindeks Pencapaian Pendidikan, standar deviasi untuk masing-masing dari empat indikator dihitung, lalu menentukan perubahan 1% yang akan diganti dari segi standar penyimpangan dengan membagi 0,01 dengan standar deviasi untuk setiap indikator.[20] Keempat nilai ini kemudian digunakan sebagai bobot untuk menghitung rata-rata yang telah terhitung dari keempat indikator. Indikator penimbangan seperti ini sangat mudah menghitungnya.

Pastikan setiap indikator memiliki dampak relatif yang sama pada subindex. Sebagai contoh, sebuah indikator dengan variabilitas kecil atau standar deviasi, seperti angka partisipasi primer, mendapat bobot lebih besar dalam subindeks Pendidikan Pencapaian daripada indikator dengan variabilitas yang lebih besar, seperti tingkat pendaftaran tersier. Oleh karena itu, sebuah negara dengan kesenjangan gender yang besar dalam pendidikan dasar (sebuah indikator di mana sebagian besar negara telah mencapai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki) akan sulit mendekati kesetaraan gender. Dalam kasus rasio jenis kelamin saat lahir (dalam Kesehatan dan Survival subindex), di mana sebagian besar negara memiliki rasio jenis kelamin yang sangat tinggi dan penyebaran datanya

[20] WEF, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil, bobot yang lebih besar akan menghukum lebih berat negara-negara yang menyimpang dari nilai ini.

Tabel 2.2 menampilkan nilai bobot yang digunakan untuk setiap subindeks. (Perhitungan berdasarkan pada Laporan Kesenjangan Gender Global 2006)

Economic Participation and Opportunity Subindex			
Ratio	Standard deviation	Standard deviation per 1% point change	Weight
Female labour force participation over male value	0.160	0.063	0.199
Wage equality between women and men for similar work	0.103	0.097	0.310
Female estimated earned income over male value	0.144	0.069	0.221
Female legislators, senior officials and managers over male	0.214	0.047	0.149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

value			
Female professional and technical workers over male value	0.262	0.038	0.121

Educational Attainment Subindex			
Ratio	Standard deviation	Standard deviation per 1% point change	Weight
Female literacy rate over male value	0.145	0.069	0.191
Female net primary enrolment rate over male value	0.060	0.167	0.459
Female net secondary enrolment rate over male value	0.120	0.083	0.230
Female gross tertiary enrolement ratio over male value	0.228	0.044	0.121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Health and Survival Subindex			
Ratio	Standard deviation	Standard deviation per 1% point change	Weight
Sex ratio at birth (converted to female-over-male ratio)	0.010	0.998	0.693
Female healthy life expectancy over male value	0.023	0.441	0.307

Political Empowerment Subindex			
Ratio	Standard deviation	Standard deviation per 1% point change	Weight
Females with seats in parliament over male value	0.166	0.060	0.310
Females at ministerial level over male value	0.208	0.048	0.247
Number of years with a female head of	0.116	0.086	0.443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

state (last 50 years) over male value			

Sumber: *Calculation of weights within each subindex.*[21]

4. Menghitung skor akhir

Semua subindex, skor tertinggi yang mungkin adalah 1 (paritas) dan skor serendah mungkin adalah 0 (ketidaksamaan), dengan demikian mengikat skor antara tolak ukur ketimpangan dan kesetaraan. Indeks Kesenjangan Gender Global 68% dari subindeks pencapaian dalam pendidikan, subindeks kesehatan dan kelangsungan hidup, subindeks pemberdayaan politik, nilai rata-rata dari setiap skor subindex digunakan untuk menghitung Global Gender Gap secara keseluruhan Skor indeks.[22] Kemudian, skor dari subindeks ini bernilai akhir kisaran antara 1 (paritas) dan 0 (imparitas), sehingga memungkinkan perbandingan relatif terhadap standar kesetaraan ideal di samping memberikan peringkat negara secara relatif. Adanya nilai paritas dan imparitas akan ada di sepanjang waktu sehingga memungkinkan pembaca untuk melihat kemajuan masing-masing negara dengan standar kesetaraan gender yang ideal. Selanjutnya, opsi penilaian secara kasar menjadikan skor Indeks akhir dengan bentuk persentase.

[21] WEF, 16
[22] WEF, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep Kesteraan Gender Dalam Pandangan Islam

Gender menjadi salah satu isu yang sangat fenomenal hingga saat ini. Gender menjadi topik yang tiada henti diperbincangkan dari segala penjuru, entah dari segi perspektif agama, sosial budaya, biologis bahkan segala jenis bidang. Sehingga, gender bisa menjadi arti dan makna yang berbeda dalam pengkosepan nya sesuai dengan pandangan yang digunakan. Dan konsep yang wajib dipahami adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender.

Gender menjadikan tolak ukur kesetaraan posisinya antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perbedaan "*differences gender*" kedudukan seperti laki-laki dijadikan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab terhadap semua keadaan dan keperluan rumah. Sedangkan, perempuan wajib mengurus dan mengelola segala kebutuhan domsetik rumah yakni, termasuk mengurus anak. Maksud dari tolak ukur di atas adalah salah satu pemikiran dari para pemikir islam tradisional dalam memandang segi hukum fiqh surat An-Nisa' ayat 34.[23]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

[23] Fatimah Zuhrah, "*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam"* https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/5SZWVGjF1347939803.pdf, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"[24]

Pemikir islam klasik pada gender di atas masih termajinalkan, sehingga perempuan masih dijadikan sebagai ukuran bahwa perempuan adalah konsep dari sebuah seks (jenis kelamin) yang tidak dipandang dalam bentuk kontruksi sosial dan budaya (gender). Sehingga, adanya bias gender, kesenjangan gender dan kesetaraan gender sulit didapat saat itu dengan faktor sosio-historis pada masanya.[25]

Perempuan Dalam Konsep Islam

a. Perempuan sebagai individu/hamba

Gender dalam perspektif islam, tak lain akan menyoroti berdsarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Didalam Al_Quran perempuan dipandang sebagai bentuk individual atau seorang hamba Allah yang sama kedudukan dengan

[24] Q.S An-Nisa': 34
[25] Fatimah Zuhrah, "*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam",* 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki. Sehingga, Al-Quran sangat baik dalam menjadikan kedudukan perempuan tanpa melihat status jenis kelamin, Al-Quran memandang perempuan sebagai gender yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.[26]

Al-Quran tidak meyebutkan bahwa terciptanya perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sebagaimana kalimat tersebut sangat lazim didengar. Al-Quran tidak mengatakan tersebut karena pada dasarnya Al-Quran menghargai kedudukan perempuan sehingga ia tidak merendahkan posisi perempuan dengan asal-usul penciptaan perempuan sebenarnya.[27] Dari sini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjelaskan perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Al-Quran dan As-Sunnah memberikan pernyataan-pernyataan bahwa perempuan adalah makhluk individu dan seorang hamba Allah,[28] berikut beberapa pernyataannya:

1. Perempuan adalah salah satu jenis makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk beribadat kepada Allah (Surat Adz-Dzariyat, ayat: 56).
2. Perempuan adalah pasangan bagi kaum adam (Surat An-naba', ayat: 8)

[26] Fatimah Zuhrah, 12
[27] Fatimah Zuhrah, 13
[28] Fatimah Zuhrah, 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab dalam segala amal perbuatan nya. (Surat Maryam, ayat: 93-95).
4. Perempuan yang beriman kepada Allah dan beramal soleh didunia akan dijanjikan hidup bahagia di dunia dan abadi di surga. (Surat An-Nahl, ayat: 97)
5. Rasulullah bersabda bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki (HR Ad-Darimy dan Abu Uwanah)

b. Perempuan dan hak kepemilikan

Islam menjadi agama yang sangat sempurna dalam memberikan keadilan kepada pemeluknya. Islam dalam memberikan perempuan bukan hanya keadilan yang didapat, namun juga sebuah kesetaraan dalam berbagai bidang missal dalam perihal ekonomi. Perempuan juga mempunyai hak kepemilikan, dan yang di maksud disini adalah hak kepemilikan dalam wujud warisan.[29] Dan warisan tersebut berdasarkan usahanya sendiri, begitu juga dengan mahar yang dibayar untuk perempuan sendiri buka dari orangtua dan suami tidak berhak mengambil lagi maskwain nya. Di dalam surat An-Nisa' ayat 32 di tegaskan :

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[29] Fatimah Zuhrah, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.[30]

Sayyid Qutb berkata tentang pembagian harta warsisan, bahwa laki-laki berhak mendapatkan kelipatan daripada perempuan sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran. Karena, laki-laki mempunyai kewajiban dan tangung jawab selain pada nafkah keluarganya juga bertanggung jawab terhadap kaitan keluarganya. kemudian, ketika perempuan telah bersuami maka segala kebutuhan ditangung oleh suaminya, dan ketika ia menjanda atau masih gadis cukup dengan harta warisan yang ia peroleh, atau tidak ditanggung oleh kerabat laki-lakinya. Sehingga, adanya perebedaan di sini karena tanggung jawab yang berbeda. [31] Lanjut ia menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum wanita dalam bidang keagamaan, pemilikan dan pekerjaan, dan realisasinya dalam jaminan mereka dalam masalah pernikahan yang hanya boleh diselenggarakan dengan izin dan kerelaan wanita-wanita yang akan dinikahkan itu tanpa melalui paksaan. “Janganlah menikahkan janda sebelum diajak musyawarah, dan janganlah

[30] Q.S An-Nisa’: 32
[31] Fatimah Zuhrah, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan gadis perawan sebelum diminta izinnya, dan izinnya adalah sikap diamnya" (HR. Bukhari Muslim).[32]

c. Perempuan dan Pendidikan

Islam telah memerintahkan seluruh umat nya laki-laki dan perempuan agar menjadi orang yang berpengetahuan dan tidak bodoh. Dan islam mewajibkan kepada setiap manusia agar menuntut ilmu sebagaimana ditegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 9.[33] Di dalam hadist jua disebutkan:

Artinya: menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan. (HR. Muslim).[34]

Demikian, islam menjadikan perempuan dan laki-laki mempunyai keadilan yang sama. Islam memandang perempuan dan laki-laki dari kemanusiaannya. Dan islam memberi hak-kewajiban kepada para perempuan sebagaimana memberikan hak-kewajiban kepada laki-laki. Sehingga, adanya sebuah kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Islam. Dan pada dasarnya islam telah berbuat adil seadil-adilnya.

Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan

Al- Quran menjelasksan adanya konsep kesetaraan gender dengan beberapa ayat sebagai berikut:

[32] Fatimah Zuhrah, 15
[33] Fatimah Zuhrah, 16
[34] Fatimah Zuhrah, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Az-Zariyat: 56 (laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sebagai hamba).

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"

Pengertian pada surat Az-Zariyat tersebut menjelaskan adanya suatu makna bahwa tidak ada perbedaan antara prempuan dan laki-laki semua makhluk ciptaan Allah adalah hamba. Karena, Allah mengukur tinggi dan derajat manusia berdasarkan tingkat ketaqwaan nya.

2. Surat Al-An'am: 165. (perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi).

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derjat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah: 30:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami selalu senantiasa bertasbih kepadaMu dan mensucikan Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.

Tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia, adalah sebagai khalifah di muka bumi, disamping sebagai hamba yang menyembah sujud dan patuh kepada Allah. Manusia dijadikan khalifah oleh Allah yakni tidak memandang status laki-laki maupun perempuan.

3. Surat Al-A'raf: 172 (perempuan dan laki-laki mendapatkan perjanjian primordial).

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) Bukankah Aku ini TuhanMu? Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.(Kami lakukan). Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Ketika anak manusia akan lahir di dunia ia akan melakukan perjanjian dengan TuhanNya. Islam memberikan tanggung jawab individual dan bentuk kemandirian sejak dalam kandungan. Karena, perempuan dan laki-laki sama menyatakan ikrar kepada Allah.

4. Surat An-Nisa': 124 (Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi). Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi.

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Juga (Al-Nahl: 97):

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Beberapa ayat-ayat di atas menjelaskan adanya kesetaraan yang cukup ideal, bahwa islam tidak melarang kepada para individual untuk tetap meraih prestasi. Bahkan islam menegaskan bahwa setiap perempuan dan laki-laki berhak untuk berkarir dan berprestasi dari bidang manapun yang mereka suka.[35]

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa agama islam mengakui adanya perbedaan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki bukan berarti islam melakukan pembedaan atau adanya diskriminasi antara keduanya.[36] Adanya sebuah perbedaan tersebut berdasarkan atas fisik-biologis yang telah ditetapkan oleh Allah atas kondisi yang berbeda. Namun, bukan berarti perbedaan tersebut menjadikan sebuah diskriminasi yang merendahkan antara satu sama lainnya.

Islam tidak mengajarkan kepada manusia agar tidak skeptis dalam membedakan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi, islam mengajarkan agar manusia dapat memadang antara satu sama lain sebagai makhluk sosial kultural yang saling mendukung. Sehingga, boleh saja satu peran dapat dilakukan dalam satu sekaligus missal perempuan selain dirumah ia juga dapat bekerja kantoran. Namun, juga terdapat beberapa peran yang hanya

[35] Fatimah Zuhrah, 20
[36] Fatimah Zuhrah, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan dalam satu peran saja, seperti mengandung dan melahirkan yang hanya bisa dijalankan oleh perempuan.[37]

2. Indeks Demokrasi

Pengertian demokrasi jika ditinjau secara epistemologis kata "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" dan "cretein" atau "cratos ". Kata"demos" yang bermakna penduduk di suatu tempat atau rakyat dan kata "cretein" atau "cratos " yang bermakna sebuah kedaulatan atau kekuasaan.[38] Sehingga, secara bahasa "demos-cretein" atau "demos-cratos" adalah sebuah sistem suatu pemerintahan yang mana negara tersebut posisi kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat dan adanya kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.[39] Kemudian, beberapa pakar ahli juga mengemukakan pengertian demokrasi sebagai berikut:

a. Joseph A. Schemer

Josep berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu rencana secara institusional agar mendapatkan suatu keputusan politik, yang mana setiap individu atau rakyat memperoleh hak berupa kekuasaan nya dengan cara memperjuangkan suara rakyat.[40]

---

[37] Fatimah Zuhrah, 20

[38] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, *Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional*; *Demokrasi* (Universitas Ahmad Dahlan; 2012), 2.

[39] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, *Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional*, 2

[40] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sidney Hook

Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu negara yang mana bentuk dari pemerintahannya terdapat keputusan pemerintah di dasarkan pada keputusan, kesepakatan dan hak dari mayoritas suara rakyat yang di lakukan secara langsung atau tidak langsung.[41]

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Philippe mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk dari sistem pemerintahan yang mana pemerintahan akan bertanggung jawab penuh atas perlakuan-perlakuan para pejabat pemerintahan yang telah terpilih didepan publik atau penduduk rayat, karena tindakan mereka dalam berkompetisi dan bekerjasama secara langsung atau tidak langsung.[42]

d. Henry B. Mayo

Henry menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk dari sistem suatu negara terhadap politik yang mana kebijkan umum dilandasakan dan ditentukan oleh wakil rakyat yang di awasi dan di pilih oleh rakyat secara langsung (wakil rakyat) melalui pemilihan yang berkala dan dilandaskan atas prinsip kesamaan politik agar terjamin nya suatu kebebasan dalam berpolitik.[43]

Ketika mengoperasionalkan indeks demokrasi peneliti menggunakan dasar dari EIU (*Economist Intelligence Unit*), dikarenakan data yang diperoleh adalah dari lembaga tersebut, dan dalam pemberian konsep terhadap makna demokrasi dan pengukuran terhadap subindex demokrasi harus sesuai dengan pengertian dari data tersebut. Menurut *Indeks*

[41] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, 3
[42] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, 3
[43] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Economist Intelligence Unit demokrasi atau indeks demokrasi didasarkan pada pandangan yang mana demokrasi mencerminkan suatu keadaan kebebasan politik dan kebebasan sipil meski tidak begitu kuat.[44]. Kebebasan adalah komponen penting dari demokrasi, sehingga terjadinya suatu demokorasi yang substantif. Sehingga dalam mengukur atau menghitung nilai demokrasi ini, didasarkan pada unsur-unsur partisipasi politik dan fungsi pemerintahan yang diperhitungkan secara marginal dan formal.

Indeks Demokrasi EIU didasarkan pada lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik. Kelima kategori tersebut adalah indeks yang saling terkait antara satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan konseptual yang koheren.[45] Kondisi yang di maksud yakni adanya keadaan bebas dan adil dalam berkompetitif di pemilu, dan pemenuhan segala aspek terkait kebebasan politik yakni *sine qua non*.[46] Semua definisi secara modern juga menganggap kebebasan sipil sebagai sesuatu komponen dari "demokrasi liberal". Sedangkan adanya prinsip perlindungan dasar manusia itu diwujudkan dalam bentuk konstitusi di seluruh dunia, terutama di PBB yang di wujukan dalam bentuk Piagam dan perjanjian internasional seperti, *Helsinki Final Act* (Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa).[47] Adapun bentuk hak asasi manusia yang mendsar yakni: kebebasan

[44] EIU, *Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation, Protest And Democracy*, 49

[45] EIU, 49

[46] Teori *sine qua non* artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.

[47] EIU, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara, berekspresi dan pers; kebebasan beragama; kebebasan berkumpul dan berserikat; dan hak atas proses peradilan yang adil.

Semua bentuk demokrasi adalah berupa sistem di mana warga negara bebas membuat keputusan politik dengan suara mayoritas. Akan tetapi, aturan oleh mayoritas belum tentu demokratis sehingga aturan dari suara mayoritas harus dikombinasikan dengan jaminan hak asasi individu dan hak-hak minoritas.[48] Sebagian besar juga harus mencakup aspek kualitas minimum dari fungsi pemerintahan. Jika keputusan berdasarkan demokrasi tidak dapat diimplementasikan, maka konsep demokrasi tidak bermakna karena, demokrasi lebih dari sekadar jumlah institusinya.

Budaya politik yang demokratis juga penting untuk legitimasi, kelancaran fungsi dan, pada akhirnya, keberlanjutan demokrasi. Sebuah budaya kepasifan dan sikap apatis warga negara berpengaruh terhadap warga negara yang tidak patuh dan tidak konsisten terhadap demokrasi. Karena, demokrasi yang sukses berasal dari budaya politik yang menyiratkan bahwa partai-partai yang kalah akan menerima secara suka rela penilaian dari para pemilih sehingga, mendapatkan kekuasaan atau pemerintahan secara damai.

Partisipasi juga merupakan komponen yang diperlukan, karena sikap apatis dan abstain adalah musuh demokrasi. Bahkan melakukan langkah-langkah menjadi partisipan yang aktif dan berfokus pada proses-proses

[48] EIU, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan dari segala bidang politik, termasuk demokrasi liberal.[49] Namun, demokrasi yang sehat membutuhkan yang partisipasi yang aktif dari warga negara yang mana memilih secara bebas dalam kehidupan publik. Demokrasi berkembang ketika warga negara bersedia untuk berpartisipasi dalam debat publik, memilih perwakilan rakyat dan bergabung dengan partai politik.

Indeks demokrasi *Economist Intelligence Unit*, diukur dan dioperasikan dengan menggunakan skala 0 sampai 10, dan dalam penilaian nya didasarkan pada 60 indikator. Indikator di sini dimaksudkan adalah sebuah pertanyaan untuk wawancara yang mana dikelompokkan ke dalam lima kategori indeks: proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik. Kemudian, setiap indikator terbagi kedalam 5 indeks tersebut, sehingga setiap indeks terdapat 12 indikator pertanyaan. Setiap indeks akan memiliki nilai dengan skala 0 hingga 10.[50]

Nilai dan skala Indeks didasarkan pada jumlah skor penilaian indikator yang kemudian dikonversi ke skala 0 hingga 10. Adapun, dilakukan nya penyesuaian skor indikator dilakukan jika negara-negara tidak mendapatkan skor 1 dalam pertanyaan yang kritis terhadap demokrasi seperti:

1. Apakah pemilihan nasional bebas dan adil.
2. Keamanan pemilih.

[49] EIU, 50
[50] EIU, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaruh kekuatan asing pada pemerintah.

4. Kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.[51]

Jika skor untuk tiga pertanyaan pertama adalah 0 (atau 0,5), satu poin (0,5 poin) dikurangkan dari indeks dalam kategori yang relevan (baik proses pemilihan dan pluralisme atau fungsi pemerintah). Jika skor untuk 4 adalah 0, satu poin dikurangkan dari berfungsinya indeks kategori pemerintah.[52]

Nilai indeks digunakan untuk menempatkan negara ke dalam empat jenis rezim:

1. **Demokrasi penuh**: skor lebih dari 8

   Demokrasi penuh: Negara yang mana mempunyai dasar kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil yang sangat dihormati, tetapi juga cenderung didukung oleh budaya politik yang kondusif bagi perkembangan demokrasinya. Fungsi pemerintahan yang sangat memuaskan. Media yang independen dan beragam fungsi. Ada sistem check and balance yang efektif. Keputusan pengadilan yang independen dan sangat ditegakkan. Dan masalah dalam demokrasi tidak rumit.[53]

2. **Demokrasi yang cacat/rendah**: skor lebih dari 6, dan kurang dari atau sama dengan 8

   Demokrasi yang cacat/rendah: Negara yang memiliki pemilihan umum secara bebas dan adil dan, masih terdapat kebebasan bermedia, dan kebebasan dasar sipil yang dihormati. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam aspek-aspek demokrasi lainnya, termasuk masalah

[51] EIU, 50
[52] EIU, 51
[53] EIU, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemerintahan, yakni budaya politik yang kurang berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik.[54]

3. **Rezim hibrid**: skor lebih dari 4, dan kurang dari atau sama dengan 6

   Rezim hibrid: proses pemilu memiliki penyimpangan yang substansial sehingga menjadikan pemilu yang jauh dari kata bebas dan adil. Tekanan pemerintah terhadap partai oposisi dan kandidat yang sudah biasa terjadi. Kelemahan demokrasi yang lebih signifikan seperti budaya politik, fungsi pemerintah, dan partisipasi politik. Korupsi cenderung meluas dan supremasi hukum lemah. Masyarakat sipil yang lemah. Dan yang terakhir adanya tindakan pelecehan dan tekanan pada jurnalis, sekaligus pengadilan tidak independen.[55]

4. **Rezim otoriter**: skor kurang dari atau sama dengan 4.

   Rezim otoriter: Di negara ini, pluralisme politik negara tidak ada sama sekali atau sangat dibatasi. Banyak negara yang masuk dalam kategori ini adalah negara yan berhadapan dengan kediktatoran secara langsung. Beberapa institusi formal demokrasi mungkin ada, tetapi ini memiliki ruang gerak yang dibatasi. Jika terdapat pemilu maka yang terjadi, tidak bebas dan adil. Banyak sekali pengabaian atas pelanggaran -pelanggaran dalam kebebasan sipil. Dari segi media dikuasai oleh negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang berhubungan dengan rezim

[54] EIU, 51
[55] EIU, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkuasa. Tidak ada kata represi kritik terhadap pemerintah dan transparansi bahkan tidak ada pengadilan yang independen.[56]

Sistem penilaian

EIU menggunakan kombinasi sistem penilaian dikotomis dan tiga poin untuk 60 indikator. Sistem skoring 1-0 dikotomis (1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak) sebagai bentuk keunggulan yang berbeda jika dibandingkan dengan skala penilaian yang lebih disempurnakan (seperti 1-5 atau 1-7 yang sering digunakan). Karena yang di gunakan banyak indikator, kemungkinan skor 0,5 diperkenankan, untuk menilai "skor abu-abu" (antara iya atau tidak/rau-ragu), di mana jawaban ya bernilai (1) dan jawaban tidak bernilai (0) dengan tanda kutip ketika diperlukan saat mengambil data.[57] Akibatnya, banyak indikator yang menggunakan sistem penilaian tiga poin, sebagai jalan tengah terhadap penilaian dan penggunaan skala yang lebih baik.

Fitur *Indeks Economist Intelligence Unit*

a. Survei opini publik

Aspek penting dan berbeda dalam melakukan pengukuran EIU, selain mendapatkan penilaian dari para ahli, EIU juga menggunakan, survei opini publik — terutama Survei terhadap penilaian Dunia. Indikator-indikator survei opini publik ini sangat mendominasi dalam kategori partisipasi

[56] EIU, 51
[57] EIU, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan budaya politik, dan sisanya kategori kebebasan sipil dan berfungsinya pemerintah. Selain menggunakan World Values Survey, sumber lain yang dapat dimanfaatkan termasuk survei Eurobarometer, jajak pendapat Gallup, Barometer Asia, Barometer Amerika Latin, Afrobarometer, dan survei nasional (tiap negara).[58] Sehingga ketika menghadapi kasus negara-negara yang tidak memiliki hasil survei maka yang digunakan adalah penilaian dari para ahli untuk mengisi kekosongan nilai.

b. Partisipasi para pemilih

Setelah meningkatnya partisipasi pemilih selama beberapa dekade, kemudian terdapat kecenderungan menurunnya jumlah pemilih di negara-negara demokrasi sejak 1960-an. Tingkat partisipasi yang rendah mungkin karena kekecewaan, tetapi juga bisa menjadi makna dari tanda kepuasan. Namun, banyak yang melihat tingkat partisipasi yang rendah sebagai bentuk dari turun nya demokrasi, dan banyak perdebatan karena faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pemilih dan bagaimana cara meningkatkannya. Tingkat partisipasi yang tinggi umumnya dilihat sebagai bukti legitimasi sistem saat ini. Namun juga berlawanan dengan sistem kepercayaan yang tersebar luas, sehingga pada kenyataannya terdapat korelasi yang erat antara jumlah pemilih dan ukuran suatu demokrasi. Yaitu, demokrasi yang dikembangkan dan dikonsolidasikan, dengan jumlah pemilih yang tinggi (umumnya di atas 70%) .

[58] EIU, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dominasi legislatif dan eksekutif

Sekian bentuk dari pendominasian legislatif dan eksekutif dari suatu negara, dapat mempengaruhi keseimbangan dalam demokrasi yang tepat, namun dalam hal ini masih diperdebatkan dalam teori politik. Dalam model EIU ini, adanya bentuk dominasi legislatif dan eksekutif yang jelas dinilai secara positif, karena terdapat korelasi yang sangat kuat antara dominasi legislatif dan ukuran demokrasi secara keseluruhan.[59]

Konsep Demokrasi Dalam Islam

Demokrasi pada dasarnya mempunyai hubungan dengan islam. Namun, mengartikan demokrasi dalam islam mempunyai beberpa penafsiran yang berbeda. Para intelektual muslim mengkaji hubungan antara islam dan demokrasi menggunakan dua pendekatan yakni secara normatif dan secara empiris. Pendekatan normatif memandang bahwa segala sistem atau bentuk demokrasi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pada pendekatan empiris, para intelektual muslim melihat adanya implementasi demokrasi dalam praktek politik dan kenegaraan.[60]

John L. Esposito dan James P. Piscatori berpendapat bahwa islam bisa dijadikan alat untuk mendukung demokrasi, kediktaroran, republikanisme bahkan monarki sekaligus.[61] Sependapat kepada Maududi demokrasi sebagai "Kerajaan Tuhan", atau Teokrasi. Namun, yang dimaksud disini adalah

[59] EIU, 52
[60] Maksum, "*Demokrasi dalam konsep islam*"(Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2014), 1
[61] Maksum, "*Demokrasi dalam konsep islam*", 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teokrasi islam bukan teokrasi pada masa kegelapan Eropa. Sifat teokrasi islam sendiri merupakan bentuk kekuasaan rakyat, umat muslim bahkan rakyat jelata sekalipun. Maududi menyatakan bahwa teokrasi adalah tiap muslim berhak untuk berpendapat dalam permasalahan hukum islam, menafsirkan hukum Tuhan selama di butuhkan dan selama telah memenuhi syarat dan telah mampu.[62] Sehingga, ketika menjelaskan menengenai kerangka konseptual demokrasi dengan islam, Esposito mengatakan bahwa itu dapat dikembangkan menjadi aspek kea rah sosial-politik. Kehadiran konsep demokrasi islam telah mengutakan beberapa konsep islami yang sudah lama berakar,dan menjadi sebuah yaitu konsep demokrasi islam. Yakni: syura, Ijma', Maslahah, dan ijtihad:

1. Syura dalam Konsep Demokrasi

Syura yang berarti musyawarah berasal dari kata bahasa arab مشاورة. Awalnya berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah" yang kemudian berkembang menjadi segala sesuatu yang dapat dikeluarkan maupun diambil (yang dimaksud adalah pendapat).[63] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah dimaknai adanya sebuah pembahasan bersama dengan maksud mencapai sebuah keputusan atas penyelesaian masalah secara bersama.[64]

Syafii Maarif berpendapat bahwa syura merupakan sebuah inti dari gagasan politik dalam al-Quran. Dan jika konsep syuro dioperasikan dalam kepemrintahan sekarang, maka konsep demokrasi yang dilaksanakan adalah

[62] Maksum, 1
[63] Maksum, 9
[64] Maksum, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk cita-cita politik Qurani. Adapun contoh demokrasi islam pada masa lampau yakni, Piagam Madinah yang merupakan bentuk konstitusi demokrasi Islam pertama dalam sejarah pemerintahan konstitusional.[65]

2. Ijma' dalam Konsep Demokrasi

Ijma' secara etimologi diartikan kesepakatan atau konsensus. Ijma' juga diartikan sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu (*Al-Azmu 'alassyai'*). Sedangkan, menurut Al Ghazali Ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad Saw secara khusus atas suatu urusan agama; definisi definisi tersebut Ijma' tidak dilakukan pada masa Rasulullah Saw, sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar'i tidak memerlukan Ijma'.[66] Konsep ijma' berdasarkan suara mayoritas sehingga diakui. Adanya, legitimasi terhadap pranata negara tidak berawal dari hukum secara tekstual, namun terhadap ijma'. Karena, inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam demokrasi Islam.[67]

3. Maslahah dalam Konsep Demokrasi

Maslahah secara etismologis berarti sebuah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Menurut al-Gazâli, yang dimaksud Maslahah, dalam arti terminologis-syar"i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan dari syariah islam dengan menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Dan Al-Gazâli menegaskan bahwa

[65] Maksum, 10
[66] Maksum, 12
[67] Maksum, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi dengan salah satu dari kelima hal tersebut maka dapat disebut sebagai maslahah.[68] Dalam konsep demokrasi islam maslahah menjadi bagian penting dari kebebasan individu dan persamaan HAM. Konsep Maslahah sendiri memberikan penilaian obyektif terhadap kepentingan umum yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi.

4. Ijtihad dalam Konsep Demokrasi

Ijtihad tidak menjawab pertanyaan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak secara taqlid, maupun qiyas. Ijtihad menurut cendekiawan muslim, sebagai kunci untuk melaksanaan kehendak Allah dalam waktu dan tempat tertentu. Karena, Ijtihad berperan pada suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Makna penting ijtihad yang ditekankan Iqba yakni "para ilmuwan sosial muslim untuk menelaah fenomena sosial dengan kerangka dan paradigma epistemologi Islam dan selanjutnya memulai proses pembangungn kembali peradaban Islam atas dasar pemahaman terhadap ilmu-ilmu sosial itu. Dekonstruksi yang disambung dengan rekonstruksi inilah yang dibutuhkan umat Islam jika ingin menjadi penengah bagi bangsa-bangsa lain sebagaimana tersurat dalam al-Quran".[69]

[68] Maksum, 13
[69] Maksum, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teoritik

Feminisme Liberal

Feminisme Liberal adalah suatu pandangan terhadap perempuan dalam mendapatkan suatu kebebasan secara penuh dan individual. Dalam aliran teori ini bahwa adanya kebebasan dan kesamaan berasal dari rasionalitas dan adanya pemisahan antara privat dan publik. Karena, menurut para pengikut aliran ini setiap manusia mempunyai hak dalam rasionalitas tanpa membedakan gender yang dimiliki. Sehingga, adanya keterbelakngan dan ketertindasan perempuan karena ketidakadaannya pandangan tersebut.[70]

Aliran ini memandang negara sebagai salah satu aktor yang kuat dan penguasan sehingga negara bukanlah aktor yang memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda dan menjadi suatu negara yang mendukung adanya pluralisme. Sehingga, kaum feminisme liberal ini meyakini adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Tugas dari aliran ini adalah menyadarkan kepada kaum perempuan bahwa permpuan dapat sebagai seseorang yang menjadi pembuat suatu kebijakan dalam negara selain menjadi warga negara.

Tokoh dari aliran fenimisme liberal ini adalah **Naomi Wolf**, ia menyatakan bahwa feminisme liberal adalah sebagai "feminism kekuatan" yang merupakan solusi terhadap pemasalahan gender dan kebebasan.[71] Karena, kini perempuan telah memiliki kekuatan terhadap beberapa sisi dan bidang yang mana awalnya hanyalah sebuah wacana dan suatu tindakan yang tidak

[70] Yanuar Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Agustus 2014). 388

[71] Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*, 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dilakukan oleh perempuan. Beberapa bidang tersebut seperti dari segi pendidikan, pendapatan, kesehatan bahkan dalam kuota kursi pemerintahan atau hak dalam berpolitik. Dan perempuan harus menuntut persamaan haknya serta dapat bebas berkehendak tanpa bergantung kepada laki-laki dan agar tidak terjadinya kesenjangan.

Akar dari teori ini memacu dalam dua segi yakni kebebasan dan rasionalitas.[72] Perempuan adalah makhluk rasional, ia memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan juga memiliki dan diberi hak yang sama dengan laki-laki. Adanya teori ini karena beberapa permasalahan kebijakan pemerintah atau pemikiran tradisional masyarakat setempat yang memberikan kesenjangan dan bias gender. Sehingga, pada abad 18 banyak tututan terhadap pendidikan dan abad ke 19 memperjuangkan adanya kesamaan dan kesempatan dalam hak sipil dan ekonomi. Dan pada abad ke 20 ini banyak sekali tuntutan dalam bidang politik sehingga banyak sekali organisasi-organisasi perempuan yang didirikan dalam menentang diskiriminasi dan kesenjangan gender dari segi sosial politik, ekonomi maupun personal.

Feminisme liberalis dijadikan salah satu landasan kerangka teori karena menurut *Indeks Economist Intelligence Unit* demokrasi atau indeks demokrasi didasarkan pada pandangan yang mana demokrasi mencerminkan suatu keadaan kebebasan politik dan kebebasan sipil meski tidak begitu kuat.[73]. Kebebasan adalah komponen penting dari demokrasi, sehingga terjadinya suatu

[72] Ikbar, 389

[73] EIU, *Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation, Protest And Democracy*, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokorasi yang substantif. Dan feminism liberal ini sangat berkaitan dengan gender dan demokrasi, bahkan makna dari demokrasi menurut pandangan EIU atas dasar sebuah keadaaan yang dinamakan "kebebasan".

Representasi Politik dan Demokrasi Deliberatif

Teori representatif atau yang bisanya disebut dengan teori representasi dikenal sejak era Romawi Kuno yang kemudian dipergunakan teolog gereja. Adanya, bentuk perubahan konsep representasi mengikuti dengan perkembangan terhadap berbagai perubahan perpolitikan, yang mana dapat terjadi secara teoritis maupun praktis. Disini teori representasi dicetuskan oleh Hannah F. Pitkin yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa konsep oleh ahli akademisi di bidangnya seperti, Monica Brito Viera dan David Runciman, Bernard Manin, Carl Schmitt, Mark Warren dan Dario Castiglione, Nadia Urbinati, Laura Montanaro dan Michael Saward.[74]

Konsep representasi menurut Hanna F. Pitkin berdasarkan tulisan di bukunya *The Concept of Representation,* ia menulis sebuah gagasan teori representasi politik yang melibatkan "election' atau pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan. Sedangkan, Suzzane Dovi menyatakan bahwa representasi politik kini bukan lagi hanya sebuah konsep yang hanya membahas para pejabat yang terpilih atau dipilih dalam sebuah tatanan negara. Dan menurut Vieira-Runciman, mereka mengatakan bahwa representasi mempunyai tiga konsep yakni, *pictorial representation* (mereka yang dipilih untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya), *theatrical*

[74] Esty Ekawati, *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral* (Jakarta: Puskapol FISIP UI, 2013), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

representation (wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya), *juridical representation* (wakil yang terpilih harus bertindak atas nama yang diwakilinya dengan persetujuan demi kepentingan bersama).[75]

Dalam artikel Taufiq Rahmat menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* atau deliberasi dalam bahasa Indonesia yang berarti konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang.[76] Demokrasi jika bersifat deliberatif maka ketika proses melakukan sebuah kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik. Karena, demokrasi deliberatif berguna dalam meningkatkan partisipasi publik dalam memberikan sebuah opini dan aspirasi ataupun sebua masukan agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang bertugas semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Dan adanya intensifikasi adalah wujud dari proses deliberasi yang mana melalui perantara diskursus publik, agar terujudnya konsep demokrasi.

Teori representasi selalu berkembang dari waktu ke waktu yang sejalan dengan perkembangan konsep demokrasi sehingga menghasilkan sebuah rumusan baru menjadi demokrasi deliberasi yang mana terkandung upaya untuk memperjuangkan representasi kelompok-kelompok yang kalangan

---

[75] Esty Ekawati, *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral*, 2

[76] Taufiq Rahmat, "Jurgen Habermas : Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik", https://www.kompasiana.com/taurahida/550d50348133115922b1e277/jurgen-habermas-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik, diakses pada tanggal 24 Maret 2019. Lihat juga F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kansius, 2007, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah dan yang tertindas. Adapun beberapa pakar ahli teoritisi dalam segmen ini ini diantaranya Anne Phillips dan Iris Marion Young.[77]

Marion Young beranggapan jika demokrasi adalah sebuah sistem yang dapat meminimalisir dominasi kemudian menciptakan adanya suatu keadilan dan partisipasi politik intens. Menurut Marion dalam bukunya Esty Ekawati "Dari Representasi Politik Formal ke Represantasi Politik Non-Formal" berfikir bahwa demokrasi deliberatif ini mempunyai nilai yang sangat inklusif dan kesetaraan terhadap politik yang mana ketika nilai dipergunakan sebagai mana mestinya maka dalam melaksanakan proses pembuatan kebijakan akan terciptanya sebuah keadilan:

> "*hanya dalam sistem politik demokrasi seluruh anggota masyarakat pada prinsipnya memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk menyalurkan atau menjaga kepentingannya. Kita percaya bahwa proses demokrasi adalah media terbaik untuk mengubah kondisi yang tidak adil dan mewujudkan keadilan*."[78]

Salah satu bentuk pengertian dari demokrasi menggambarkan suatu aturan mayoritas yang sederhana dan didasarkan pada prinsip "*one person, one vote*". Jon Elster kemudian mengaitkan hubungan antara konstitusionalisme dengan demokrasi. Sebagaimana yang dikutip oleh Esty Ekawati dalam bukunya yang berjudul "Dari Representasi Politik Formal ke Represantasi Politik Non-Formal", Jon Elster sendiri mengkonstruksikan:

> " *Bahwa bangsa yang demokratis adalah bangsa yang melibatkan selain mayoritas, maka minoritas atau kelompok terabaikan seperti buruh,*

[77] Esty Ekawati, *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral* (Jakarta: Puskapol FISIP UI, 2013), 6

[78] Esty Ekawati, *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara asing, perempuan, tuna wisma atau minoritas lainnya terlibat dalam sistem pemilihan".[79]

Beberapa kasus tertentu menyimpulkan akan adanya kesetaraan politik mengakibatkan partisipasi politik. Sehingga, ketika terdapat permasalahan dalam klasifikasi perbedaan kelas, etnis maupun gender dalam masyarakat suatu negara maka ini dapat terjadi sebuah ketidaksetaraan politik (*inequality*). Meski, kesetaraan politik tidak secara spesifik menunjukkan jenis perlakuan, dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai hak kekuasannya dalam mempengaruhi kebijakan yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih kandidat sesuai pilihan mereka dalam memenangkan suatu pemilu. Beitz beranggapan bahwa warga negara atau masyarakat harus diperlakukan dan mendapatkan kesetaraaan terutama dalami berpartisipasi dalam proses politik dan juga harus diperlakukan secara adil sebagai salah satu pemberi aspirasi mereka terhadap kebijakan publik. Sehingga, yang menjadi titik pusat dari demokrasi adalah bagaimana masyararkat dapat ikut andil dalam proses pembentukan, penentuan dan penyusunan kebijakan politik.[80]

Para perempuan di belahan bumi pada aspek sosial sebagian besar kurang terwakilkan hak dan suara mereka dalam meraih kepentingannya terutama di parlemen, sehingga jauh dari bentuk keterlibatan proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang menyangkut kepentingan publik dan pada khususnya terhadap kepentingan perempuan. Padahal sudah banyak sekali

[79] Esty Ekawati, 7
[80] Esty Ekawati, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan perempuan dan beberapa teori politik feminis yang sangat berperan terhadap perubahan yang terjadi. Sehingga, minimnya angka keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik dan parlemen, bukanlah akibat keterbatasan aspek ekonomi dan tingkat pendidikan perempuan saja. Namun, rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam politik sebenarnya dipengaruhi oleh begitu banyak faktor baik itu faktor budaya patriarki, ekonomi, dan sosial politik dalam pemerintahan (demokrasi).[81]

Feminisme Dalam Islam

Feminism islam sebenarnya menolak akan adanya teoori-teori feminis barat, terkhusus ketika menempatkan laki-laki sebagai lawan dari perempuan. Meskipun, seperti itu feminism islam tetap mejunjung tinggi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Feminism islam, berada di tengah pemahaman antara pemikiran kalangan tradisional yang menjadikan perempuan dibawah kekuaan laki-laki dengan para pemikir kontemporer yang sering dimanfaatkan oleh feminis barat. Sehingga, feminism islam disebut juga Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki sebagai makhluk sosial-kultural.[82]

Feminisme Islam memperjuangkan "Islam pasca-patriarkhi" oleh Riffat Hassan, yang dimaksud Riffat sendiri yakni "Islam Qur'ani".[83] Yaitu, dengan memperhatikan pem- bebasan terhdap manusia, antara perempuan dan laki-laki

[81] Esty Ekawati, 7

[82] Ariana Suryorini, "*Menelaah Feminisme Dalam Islam"*(Volume 7, Nomor 2, April 2012), 4

[83] Ariana Suryorini, "*Menelaah Feminisme Dalam Islam",* 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa jenis perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, dan segala jenis perbudakan yang melarang manusia untuk mengekspresikan visi Qur'ani yakni sebagai tujuan hidup manusia yang akan kembali kepada Allah dan mewujud perdamaian. Jika tiada penghapusan kesenjangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam kehhidupan bersosial secara individu maupun bermasyaakat maka tidak ada kata perdamaian seperti yang diingankan al-Qur'an.[84]

Jalaluddin Rakhmat menulis dalam bukunya yang berjudul *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan,* ia menulis sebuah uraian feminism secara ringkas dan sangat menarik. Setelah meninjau berbagai gerakan dan visi feminisme, Jalaluddin Rakhmat berkesimpulan:

> "Walhasil, Islam sangat memuliakan perempuan. Orang Islam harus berjuang memuliakan mereka. Bila keadaan perempuan sekarang ini belum mulia, maka kaum muslim wajib mengubah masyarakat sehingga posisi mereka menjadi mulia. Jadi sampai disini orang Islam boleh dikatakan feminis."[85]

C. jKajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang akan di lakukan. Selain itu, penulis membandingkan topik penelitian sekaligus judul yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya agar penelitian yang

[84] Ariana Suryorini, 5
[85] Ariana Suryorini, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan penulis ini memiliki kesan orisinilitas. Setelah meninjau banyak penelitian, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian yang diangkat oleh penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu dari beberapa makalah, jurnal terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

a. Menurut penelitian dari Carolline Beer, Universitas Vermont dalam judul *democracy and gender quality* peneliti menjelaskan tentang hubungan antara demokrasi dan kesetaraan gender. Dengan memperhatikan dan menghubungkan antara demokrasi dengan perdamaian dunia, hak asasi manusia, pembangunan manusia bahkan kebijakan atau beberapa keputusan yang mempengaruhi adanya demokrasi terhadap kesetaraan gender. Peneliti menjelaskan akan adanya partisipasi wanita yang di batasi, padahal wanita adalah salah satu komponen penting terhadap demokrasi.[86]

   Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah spesifikasi peneliti yang melihat gambaran adanya hubungan demokrasi dan kesetaraan gender secara umum. Sedangkan, penulis melihat secara terperinci dan dibagi dalam beberapa indikator, diantaranya: pendidikan, kesehatan, partisipasi politik dan kebijakan pemerintah.

b. Menurut penelitian Tesis milik Sara Souad Lungdegren dengan judul "*Women's Political Representation In The Philippines –A Study About Gender Equality In The Government Of The Philippines*" bertujuan untuk

[86] Carolline Beer, "*Democracy and Gender Equality"* (DOI 10.1007/s12116-009-9043-2: Januari 2015), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dan menganalisis situasi kesetaraan gender dalam berpolitik di Filipina, menyelidiki peluang perempuan untuk aktif secara politik dan berkecinampung terhadap pengaruh politik, mencari sebuah kesenjangan posisi horizontal dan vertikal antara representasi perempuan dan laki-laki dalam politik dan menyelidiki kemungkinan dan masalah lebih lanjut itu mungkin terkait dengan representasi politik perempuan di Filipina.[87]

Hasil dari dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan sama kompetennya dengan laki-laki di bidang politik, dan mereka memiliki banyak pengalaman untuk berkontribusi dalam politik yang bermanfaat bagi semua warga negara, tetapi lebih mudah bagi perempuan untuk masuk politik jika mereka adalah bagian dari klan politik atau keluarga yang sedang melakukan kegiatan politik. Tetapi para wanita ini, yang menggantikan posisi anggota keluarga mereka di parlemen, sehingga para wanita biasanya menunggu keputusan anggota tersebut, dan mereka tidak bertindak menurut kehendak mereka sendiri.

Adapun perbedaan antara judul yang di atas dengan yang penulis ampu terlihat dari objek yang dipilih yakni berfokus pada partisipasi politik. Sedangkan penulis menitikberatkan terhadap segala aspek kesenjangan dari segi pendidikan, partispasi politik, kesehatan dll dan bukan hanya fokus pada satu segi yakni partisipasi politik.

c. Menurut penelitian Patricia Funk di Standford University dengan judul *Gender Gaps in Policy Making: Evidence from Direct Democracy in*

[87] Sara Souad, "*Women's Political Representation In The Philippines –A Study About Gender Equality In The Government Of The Philippines"* (Hogskolan I Boras: 2017), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Switzerland. Penelitian yang ditulis pada tahun 2008 ini menjelaskan bahwa meningkatnya representasi perempuan dalam politik. Penelitian ini berfokus pada data dalam pengambilan kebijakan yaitu keputusan pengambilan suara untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam pembuatan kebijakan. Hasil analisis penelitian ini berfokus pada satu negara Swiss, di mana semua warga negara dapat secara langsung menentukan berbagai kebijakan dalam referendum dan secara inisiatif. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender yang besar di bidang kesehatan, perlindungan lingkungan, pembelanjaan pertahanan dan kebijakan dalam kesejahteraan yang berhubungan dengan sosio-ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembuat kebijakan yang berasal dari kalangan perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap publik, tetapi pengaruh kecil pada pemerintah.[88]

Adapun perebdaan yang penulis teliti yakni adanya titik fokus dalam gender gap itu sendiri. Jika, peneliti Patrik berfokus pada pembuat kebijakan dalam gender Gap, maka penulis berfokus pada kesenjangan gender di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, peluang dan partisipasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yakni partisipasi dalam politik atau kursi pemerintahan.

D. Hipotesis Penelitian

Melihat wujud dari demokrasi sendiri adalah salah satu makna dari kebebasan, yang telah di sampaikan dalam pendapat EIU dan meninjau teori

[88] Patricia Funk, "*Gender Gaps in Policy Making: Evidence from Direct Democracy in Switzerland"(*Stanford University: 2008), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

feminis leberalis sangat bersangkutan dengan adanya demokrasi. Begitu juga dengan teori representatif dan demokrasi deliberatif yang menunjukkan adanya keterkaitan antara gender dan demokrasi yang berpusat pada sistem politik dan keterwakilan gender. Kajian pustaka yang telah diteliti sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan atau hubungan positif antara kesenjangan gender dan indeks demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.1 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan koreksional. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa angka, atau berupa kata dan kalimat yang kemudian dikonversikan menjadi data angka.[2] Lalu, data yang telah didapat tersebut diolah dan di analisis secara ilmiah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penelitian ini juga termasuk penelitian perbandingan politik berjenis single country studies dengan unit (n) yang dibandingkan di dalam suatu negara (within unit variations) dari tahun 2010 hingga 2018 (across period of time) dengan menggunakan data yang sudah matang (secondary data) atau data skunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia oleh lembaga, instansi atau pemerintahan.[3] Dimana data skunder dalam penelitian ini diambil dari dua instansi, yaitu World Economy Forum (WEF) untuk kesenjangan gender dan Economist Intelligence Unit (EIU) untuk indeks demokrasi.

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitif, Kuantitafi dan R&D*,(Bandung: CV Alfabeta,2011),7.

[2] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis data Sekunder*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 20

[3] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis data Sekunder, 21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil suatu studi kasus terhadap negara yang bersangkutan sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan antara kesenjangan gender dan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 – 2018.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini di ambil berdasarkan studi kasus negara Filipina terhadap permasalahan kesenjangan gender dan indeks demokrasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan lingkup tingkat internasional, sehingga ketika mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan data internasional dengan menggunakan perkembangan teknologi internet. Adapun tempat pengambilan data sekunder nya berdsarkan data yang dibutuhkan yakni: data kesenjangan gender peneliti mengambil data di laman web https://www.weforum.org/ dengan nama instansi *The Word Economy Forum* (*The WEF*), dan untuk data indeks demokrasi peneliti mengambil data di laman web www.eiu.ac/ dengan nama instansi *The Economic Intelligence Unit* (*The EIU*).

Waktu penelitian yang digunakan yakni *across period of time* (dari tahun 2010 – 2018) dengan teknik cross-sectional. Penelitian *cross-sectional* adalah penelitian yang dilakukan satu waktu tertentu dengan satu fokus. Waktu disini di artikan dalam satuan hari, minggu, bulan atau tahun.4 Peneliti mengambil satuan waktu sampai dalam batasan yang telah ditentukan dalam jangka beberapa bulan untuk meneliti hubungan antara kesenjangan gender dan

[4] Nanang Martono, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 - 2018. Adapun *accross period of times* digunakan untuk periode analisa data yaitu kesenjangan gender dan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 – 2018 dengan data skunder yang diperoleh dari instansi WEF dan EIU. Untuk teknik *cross-sectional* adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dalam satu waktu.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data skunder. Dimana data diambil dari lembaga atau instasi yang telah di olah oleh lembaga tersebut dengan nama *The Word Economy Forum (The WEF)* untuk mengetahui perkembangan kesenjangan gender di Filipina pada tahun 2010-2018 dan lembaga *The Economic Intelligence Unit (The EIU)* untuk mengetahui perkembangan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010-2018.

D. Deskripsi Sumber Data

a. The WEF (World Economic Forum)

1. Sejarah *The WEF (World Economic Forum)*

The WEF (*World Economic Forum*) adalah sebuah organisasi atau yayasan yang bergerak secara non profit. The WEF berdiri sejak tahun 1971 didirikan di Jenewa Switzerland oleh Klaus M.Schwab selaku pembisnis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal pada saat itu.[5] Selama empat dekade Forum Ekonomi Dunia (The WEF) telah mengadakan banyak pertemuan. Sehingga, Forum ini terkenal karena diadakannya pertemuan setiap tahunannya di Davos-Klosters. Selama bertahun-tahun, banyak sekali dari kalanganan pembisnis, pemerintah, dan masyarakat dating berbondong-bondong untuk diskusi terhadap isu-isu global yang sedang hangat pada saat itu dan mereka saling bertukar pikiran tentang solusi untuk mengatasi permasalahan isu-isu tersebut.

The WEF, semakin mengglobal dan terkenal sehingga banyak sekali lembaga global dan para pemimpin politik yang ikut partisipasi dalam pertemuan mereka, dalam pertemuan tahunan. Forum Ekonomi Dunia merupakan kegiatan berupa inisiatif Forum oleh pemerintah, bisnis dan tokoh masyarakat sipil di seluruh dunia. Forum ini melibatkan yang orang-orang yang sangat berpengalaman dan bahkan sangat menjanjikan terutama dalam bidangnya.

Profesor Klaus Schwab awalnya mendirikan forum yang disebut Forum Manajemen Eropa, yakni sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Jenewa, Swiss. Sehingga, forum ini dapat menarik para pemimpin bisnis dari Eropa, dan bahkan menjadikan forum ini lebih berkembang dan meluas hingga ke beberapa penjuru dunia sampai diadakannya Pertemuan Tahunan setiap Januari.[6]

---

[5] The WEF. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years*". https://www.weforum.org/about/history.

[6] The WEF. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profesor Schwab awalnya hanya memfokuskan pertemuan pada perusahaan-perusahaan Eropa agar dapat mengejar ketertinggalan dengan praktik manajemen di Amerika Serikat. Disini, dia juga mengembangkan dan mempromosikan pendekatan manajemen yang disebut 'pemangku kepentingan'. Karena, dasar dari keberhasilan suatu perusahaan tak lepas daripada manajer (yang memperhitungkan semua kepentingan), para pemegang saham, klien dan pelanggan, tetapi juga karyawan dan masyarakat di mana mereka beroperasi termasuk para pemerintah negara

Visi Profesor Schwab sendiri menjadikan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) yang tumbuh dengan sangat cepat sebagai hasil dari pencapaian 'tonggak sejarah'. Sebagai contoh, ketika peristiwa pada tahun 1973, runtuhnya mekanisme nilai tukar tetap Bretton Woods dan Perang Arab-Israel, melihat adanya permasalahan seperti itu maka diadakanya Pertemuan Tahunan yang mana fokusnya dari terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Dan para pemimpin politik diundang untuk pertama kalinya ke Davos pada Januari 1974 untuk menyelesaikan masalah tersebut.[7]

Dua tahun kemudian, WEF mengadakan pertemuan dan membentuk sistem keanggotaan untuk perusahan-perusahaan di dunia, yakni '1.000 perusahaan terkemuka dunia'. *European Management Forum* adalah lembaga non-pemerintah pertama yang memulai kemitraan dengan komisi pembangunan ekonomi China dan mendorong kebijakan reformasi ekonomi

[7] The WEF. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Cina. Diadakannya pertemuan regional di seluruh dunia juga ditambahkan ke dalam kegiatan tahun ini. Sehingga, kegiatan ini menjadi sebuah sorotan dan dipublikasikan dengan tema "*Global Competitiveness Report".* Pada tahun 1979 organisasi ini telah berkembang menjadi pusat diskusi pengetahuan juga, selain fokus dalam bentuk ekonomi.[8]

Pada tahun 1987, Forum Manajemen Eropa menjadi Forum Ekonomi Dunia dan kini telah memperluas visinya dengan memberikan banyak platform untuk diadakannya dialog. Yakni dengan mengadakan Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia hingga masa kini. Pertemuan-pertemuan yang di adakan oleh para petinggi negara seperti Deklarasi Davos yang telah ditandatangani pada tahun 1988 oleh Yunani dan Turki dengan meniadakan perang atau genjatan senjata. Pada tahun 1989, Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan pertemuan tingkat menteri pertama mereka di Davos. Dan pada pertemuan yang sama, Perdana Menteri Jerman Timur Hans Modrow dan Kanselir Jerman Helmut Kohl bertemu untuk membahas reunifikasi Jerman. Pada tahun 1992, Presiden Afrika Selatan de Klerk bertemu Nelson Mandela dan Ketua Mangosuthu Buthelezi pada Pertemuan Tahunan, yang mana pertemuan pertama ini mereka lakukan di luar Afrika Selatan sebagai bentuk wujud dari tonggak sejarah dalam transisi politik negara itu.[9]

Pada 2015, Forum Ekonomi Dunia kini telah resmi diakui oleh dunia sebagai organisasi internasional yang benar-benar terpecaya. Lembaga ini

[8] The WEF. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years".*
[9] The WEF. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan dampak yang cukup banyak pada dunia, seperti pertemuan antara para petinggi negara bahkan membahas isu-isu terkini dan menerbitkan sebuah laporan penelitian yang cukup diakui kevalidan datanya. Dan sekarang WEF berada pada fase sebagai platform global sebagai bentuk kerja sama publik-swasta.

2. Misi The WEF (World Economic Forum)

Forum Ekonomi Dunia adalah Organisasi Internasional dengan bentuk Kerjasama Publik-Swasta. Forum ini melibatkan para pemimpin politik, bisnis, dan masyarakat terkemuka lainnya untuk membentuk sebuah genda global, regional, dan industri. Didirikan pada tahun 1971 sebagai yayasan nirlaba dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Forum ini independen, tidak memihak dan tidak terikat pada kepentingan khusus apa pun. Forum Ekonomi Dunia (The WEF) berusaha dalam semua upayanya untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai bentuk kepentingan publik dengan menegakkan standar tata kelola yang tinggi., integritas terhadap moral dan intelektual.[10]

Sebuah bentuk aktivitas organiasasi berasal dari budaya institusional yang unik, karena didirikan berdasarkan para pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa organisasi ini bertanggung jawab atas semua bagian masyarakat. Lembaga ini juga bekerja sama dengan berbagai jenis organisasi, baik dari sektor publik dan swasta, organisasi internasional dan lembaga akademik. Sehingga, organisasi ini begitu seimbang dan

[10] The WEF, "*Our Mission The World Economic Forum*"https://www.weforum.org/about/worldeconomic-forum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh terhadap segala faktor kepentingnaan publik. Sehingga, lembaga ini percaya bahwa kemajuan terjadi dengan menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang memiliki semangat, motivasi, dorongan dan pengaruh untuk melakukan perubahan positif.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur Organisasi

Forum ini diketuai oleh Pendiri dan Ketua Eksekutif oleh Profesor Klaus Schwab. Dalam sturktur nya dipandu oleh Dewan Pengawas, yakni dewan yang bertindak sebagai penjaga dan pemegang misi beserta nilai-nilainya, dan mengawasi kerja Forum dalam menjaga kepentingan publik. Dewan Pengawas terdiri dari para pemimpin terkemuka dari pembisnis, politik, akademisi dan masyarakat sipil. Dalam menjalankan tugas mereka di dewan pengawas, para anggota tidak mewakili kepentingan pribadi dan mereka harus profesional. Karena, sebagai bentuk cerminan dari status multistakeholder. Dewan pengawas dan keanggotaannya dibagi secara merata yakni dengan mewakilkan dari pemangku bisnis, pemerintah dari organisasi internasional dan masyarakat sipil.[11]

Dewan Pengelola, yang diketuai oleh Presiden Forum Børge Brende yang bertindak sebagai badan eksekutif Forum Ekonomi Dunia.[12] Dia bertugas memastikan bahwa kegiatan memenuhi misi Forum dan bertindak sebagai wakil bagi pihak luar. Dewan Pengelola memiliki tanggung jawab

[11] The WEF, "*Leadership and Governance*" https://www.weforum.org/about/leadership-and governance
[12] The WEF, "*Leadership and Governance*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara eksekutif kolektif terhadap forum dan melapor kepada Dewan Pembina.

Struktur Organisasi The WEF:[13]

Pendiri dan Ketua Eksekutif: Klaus Schwab

Dewan Pengawas: Mukesh D. Ambani, Marc Benioff, Peter Brabeck-Letmathe, Mark Carney, Chrystia Freeland, Orit Gadiesh, Fabiola Gianotti, Al Gore, Herman Gref, Angel Gurría, André Hoffmann,Christine Lagarde, Jack Ma, Yo-Yo Ma, Peter Maurer, Min Zhu, Luis Alberto Moreno, H.M. Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan, L. Rafael Reif. David M. Rubenstein, Klaus Schwab, Jim Hagemann Snabe, Heizo Takenaka dan Ursula von der Leyen.

Presiden: Børge Brende – President

Dewan Pengelola: Emma Benameur, Børge Brende, Julien Gattoni, W. Lee Howell, Jeremy Jurgens, Anil Menon, Adrian Monck, Sarita Nayyar, Richard Samans, Olivier M. Schwab, Murat Sönmez, Dominic Kailash Nath Waughray, Saadia Zahidi dan Alois Zwinggi.

Komite Eksekutif: David Aikman Marisol Argueta de Barillas, Arnaud Bernaert, Matthew Blake, Roberto Bocca, Sebastian Buckup, Denise Burnet, Vanessa Candeias, Oliver Cann, Fon Mathuros Chantanayingyong, Nicholas Davis, Sean de Cleene, Sean Doherty, Silvio Dulinsky, Mirek

[13] The WEF, "*Leadership and Governance*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusek, John Dutton, Makiko Eda, Maha Eltobgy, Malte Godbersen, Knut Haanaes, Zara Ingilizian, Philippe Isler, Troels Oerting Jorgensen, Elsie S. Kanza, Zvika Krieger, Ramya Krishnaswamy, Martina Larkin, Helena Leurent, Viraj Mehta, Stephan Mergenthaler, Derek O'Halloran, Mel Rogers, Stephan Ruiz, Paul Smyke, Mark Spelman, Masao Takahashi, Anne Toth, Terri Toyota, Stefano Trojani, Christoph Wolff dan Justin Wood

4. Anggota *The WEF (World Economic Forum)*

World Economic Forum menyediakan platform bagi 1.000 perusahaan terkemuka di dunia untuk membantu membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam sistem keanggotaan, forum ini melibatkan bisnis dalam proyek dan inisiatif - online dan offline - untuk membantu mengatasi masalah industri dan perusahaan regional secara sistemik. Sehingga, anggota dan mitra mendapatkan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam keanggotaan maupun mitra di lembaga ini, yang disesuaikan berdasarkan strategi perusahaan mereka. Semakin banyak keterlibatan dan keikutsertaan perusahaan, maka semakin besar diadakannya agenda Forum.[14]

Keterlibatan Sistem Inisiatif: Sistem insiatif yakni menghubungkan para pemangku kepentingan di dalam dan di luar industri kawasan, sehingga mereka dapat berkolaborasi dalam memberikan perubahan positif dan penyelesaian terhadap masalah sistemik.[15]

[14] The WEF, "*Our Members and Partners*" https://www.weforum.org/about/our-members-and-partners
[15] The WEF, "*Our Members and Partners*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan regional: Keterlibatan di tingkat regional yakni membahas tentang dinamika kawasan, pasar, pembuatan kebijakan, dan komunitas bisnis secara luas dan menyeluruh.[16]

Keterlibatan masyarakat: Oranisasi ini telah mengembangkan jaringan komunitas yang besar dan meluas, sehingga masing-masing anggota dan mitra dapat meningkatkan kolaborasi. Keterlibatan masyarakat ini akan terhubung dengan para pemimpin dan inovator muda, penggiat teknologi dan para pengusaha besar.[17]

Industri Afiliasi

Setiap komunitas Industri di Forum Ekonomi Dunia terdiri dari perusahaan, mitra yang terpilih, sehingga mereka dapat mengembangkan industri mereka dengan cara yang cukup strategis dan dapat bertanggung jawab secara sosial.[18] Gubernur Industri terdiri dari kepala eksekutif dan ketua yang bertugas dalam memimpin, dan menentukan agenda industri serta dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Komunitas industri menyediakan platform bagi ketua eksekutif dan senior eksekutif dengan memberikan tanggung jawab secara strategis, dalam bidang bisnis, ataupun tingkat regional untuk mengembangkan industri terhadap wawasan melalui platform dan komunitas yang diagendakan Forum.

Strategis Kemitraan

Strategis kemitraan Forum Ekonomi Dunia telah mewakili 100 perusahaan global terkemuka, masing-masing memberikan aspirasi yang

[16] The WEF, "*Our Members and Partners*"
[17] The WEF, "*Our Members and Partners*"
[18] The WEF, "*Our Members and Partners*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting untuk mendukung misi Forum dan meningkatkan keadaan yang lebih baik lagi pada dunia.[19] Hanya perusahaan yang paling dikenal dengan rekam jejak yang baik dapat menunjukkan tata kelola yang baik dan keselarasan dengan nilai-nilai Forum ekonomi dunia, sehingga dijadikan lembaga ini.

Signifikansi adanya ekonomi dan sosial mengartikan bahwa perusahaan dapat memainkan peran penting sebagai kemitraan dan anggota yang baik dan warga dunia yang baik. Karena, mereka membentuk masa depan melalui kontribusi mereka yang luas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proyek-proyek visi forum ekonomi dunia dan memperjuangkan dialog atau suara publik. Adanya, strategis kemitraan dapat terlibat dalam hingga enam inisiatif sistem yakni sebuah wilayah atau komunitas. Adapun dapat mengakses ke dalam jaringan Forum ekonomi dunia dan para pakar memberikan partisipasi ketika melakukan pengambilan keputusan tentang isu-isu industri dan lintas-industri.

Rekan Strategis Kemitraan

Kemitraan dalam strategis ekonomi di Forum Ekonomi Dunia mencakupi bidang bisnis yang terkemuka di dunia, dan secara aktif mereka terlibat dalam membentuk masa depan industri, kawasan, dan masalah sistemik dunia. Perusahaan-perusahaan ini percaya pada warganegara perusahaan dunia dan mereka berkomitmen untuk memberikan perubahan dan dampak yang positif.

[19] The WEF, "*Our Members and Partners*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekan strategis kemitraan dapat terlibat dalam empat sistem yang insiatif, wilayah, atau komunitas. Agar dapat mengakses ke forum para pakar dan jejaring multipihak, mereka harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu industri dan lintas-industri. Rekan strategis kemitraan diwakili di komunitas Forum, acara dan proyek oleh *chief executive officer*, ketua atau eksekutif dan dewan lainnya. Para eksekutif ini secara pribadi terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan inisiatif di dalam Forum.[20]

Kemitraan

World Economic Forum Partners adalah perusahaan kelas dunia dengan banyak para peminatnya. Karena, mereka dapat memberikan solusi terbaik dalam permasalahan sistemik sebagai tantangan utama. Mereka telah memberikan solusi terbaik di balik program Forum.

Mitra dapat terlibat dalam hingga tiga sistem insiatif, yakni wilayah atau komunitas dan akses ke jaringan Forum. Para ahli memberikan Mitra dengan visibilitas dan memberikan wawasan yang sensitif waktu pengambilan keputusan secara strategis terhadap masalah yang menurut mereka paling penting. Dalam perwakilan kemitraan ini diwakii oleh kepala eksekutif, ketua atau eksekutif tingkat dewan lainnya. Para eksekutif ini secara pribadi juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan inisiatif.

Rekan Kemitraan

[20] The WEF, "*Our Members and Partners*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan Rekan Kemitraan dalam *World Economic Forum* adalah peserta aktif dalam komunitas Forum yang memiliki minat kuat dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat mereka pada umumnya. Rekan Kemitraan berhak untuk terlibat dalam satu sistem insiatif dalam, wilayah, atau komunitas. Rekan Kemitraan bekerja sama dengan WEF untuk memajukan proyek di bidang yang mereka minati. Mereka mendapatkan akses ke jaringan WEF dan memberikan wawasan visibilitas juga sensitif waktu pengambilan keputusan yang strategis terhadap permasalahan sistemik yang paling penting bagi mereka.[21]

5. Manfaat *The WEF (World Economic Forum)*

Strategi Forum yang sederhana dan efektif: yakni menyatukan para pemimpin yang paling berpengalaman dari semua sektor masyarakat global, dan mengidentifikasi cara terbaik untuk mengatasi permasalahan yang paling signifikan di dunia. Selama hampir 50 tahun, Forum telah menjadi katalis untuk inisiatif global, merubah bersejarah, terobosan industri, ide-ide ekonomi, puluhan ribu proyek dan kolaborasi. Forum ini meningkatkan keadaan dunia menjadi lebih baik. Tiga point manfaat utama adanya lembaga ini yakni:

- **Membangun kesadaran dan kerja sama**

Forum ini menciptakan manfaat dengan mengumpulkan para pemimpin dari pembisnis, pemerintah, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil

[21] The WEF, "*Our Members and Partners*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kaum muda untuk bekerja bersama dan mendorong perubahan positif. Seperti: mengatasi perubahan cuaca, mengelola air bersih dengan baik, dll.[22]

- **Membentuk pola pikir dan agenda**

Laporan lembaga ini berupa, kerangka kerja kebijakan dan strategi yang memengaruhi prioritas pemerintah, strategi bisnis, dan opini publik. Seperti: laporan kesenjangan gender, bagaimana WEF dapat membantu pemerintah global dalam mengurangi kesenjangan gender.[23]

- **Menyetir aksi kolektif**

Proyek dan kegiatan kolaborasi yang didukung bahkan di mulai oleh WEF kemudian berdampak pada jutaan orang, seperti menyelamatkan nyawa jutaan manusia melalui vaksinasi pada masa kanak-kanak hingga meningkatkan produktivitas pertanian skala kecil.[24]

6. Alamat kantor

- World Economic Forum Pusat :

  91-93 route de la Capite, CH-1223 Cologny/Geneva Switzerland.

  Contact numbers: Tel: +41 22 869 1212

  Fax: +41 22 786 2744

- World Economic Forum USA :

  350 Madison Avenue, 11th Floor New York, NY 10017, USA

  Contact numbers: Tel: +1 212 7032300

[22] The WEF, "*Our Impact Improving the state of the world*" https://www.weforum.org/our-impact
[23] The WEF, "*Our Impact Improving the state of the world*"
[24] The WEF, "*Our Impact Improving the state of the world*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fax: +1 212 7032399

b. The EIU (The Economist Intelegency Unit)

1. Tentang *The EIU (The Economist Intelegency Unit)*

The Economist Intelligence Unit (The EIU) adalah sebuah lembaga terbesar didunia dalam bidang intelijen bisnis global. Lembaga inni membantu dari segi bisnis, sektor keuangan dan dalam dunia pemerintahan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan suatu negara. Keahlian yang dimiliki secara global yakni, membantu dalam penelitian, analisis, dan data yang berkualitas tinggi terhadap suatu negara, kota, industri dan perusahaan, dan yang pasti memberikan solusi melalui konsultasi jaringan agar dapat membantu klien menavigasi permasalahan dalam bisnis (bidang utama).[25]

Lembaga EIU adalah sebuah bagian dari divisi penelitian dan analisis dari *The Economist Group*, yakni sebuah perusahaan surat kabar The Economist. Didirikan pada tahun 1946, sehingga lembaga ini cukup berpengalaman selama 70 tahun dalam membantu bisnis, perusahaan keuangan, dan pemerintah untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menciptakan peluang yang banyak dan risiko yang sedikit.[26] Perusahaan ini berada di Inggris, namun sangatlah mendunia. Sehingga, EIU dapat melayani klien di seluruh dunia dari 24 kantor yang telah tersebar diseluruh dunia, dengan fasilitas para staf yang dapat menguasai lebih dari 25 bahasa. Direktur Pelaksana pada saat ini adalah

[25] The EIU, "*Introduction*"http://www.eiu.com/home.aspx#about
[26] The EIU, "*Introduction*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Robin Bew, dan sebelumnya hanya di pimpin oleh Direktur Editorial dan Kepala Ekonom perusahaan. EIU menyediakan analisis negara, industri, dan manajemen di seluruh dunia dan pernah bekerjasama *Business International Corporation*, sebuah perusahaan Inggris yang diakuisisi oleh perusahaan induknya pada tahun 1986.[27]

EIU dalam melakukan penelitian menggunakan data tervalid dengan metodologi terbaik dan orang-orang terbaik. Lembaga ini menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk memperoleh dan memeriksa data ekonomi dan pasar, termasuk dalam penggunaan teknik penelitian dan terjun ke lapangan bila perlu. Beberapa metodologi, kerangka kerja dan alat analisis lembaga ini adalah kuantitatif, dan sebagian lain kualitatif. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian dan alat yang digunakan semua canggih. Orang-orang dan para analasis terdiri dari pakar negara atau industri yang berpengalaman, yang memiliki pendapat dan kualifikasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan klien.

2. Analis *The EIU (The Economist Intelegency Unit)*

Economist Intelligence Unit (EIU) menjadikan salah satu lembaga yang mempunyai tim analis terbesar dan paling berpengalaman di dunia, dengan jumlah 121 pakar yang ahli dalam bidangnya. Lembaga ini mempunyai relasi dari berebagai negara di dunia dan tidak tidak ada bandingannya. Adapun para analisis tersebut dalam bidang ekonomi, politik, pengambilan keputusan darurat, dan wawasan industri sebagai bidang yang

[27] The EIU, "*Introduction*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama, serta dapat memberikan solusi tanpa harus bertatap muka melalui EIU Consulting.[28]

3. Jaringan Negara The EIU (The Economist Intelegency Unit)

Afrika, Albania, Argentina, ASEAN, Asia, Australia, Bahrain, Brazil, Bulgaria, Canada, sentral Afrika, sentral Asia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Denmark, Djiboutim Eropa Timur, Mesir, El Salvador, Eritrea, EU, Eurasia, Euro zone, Eropa, Perancis, Gabon, GCC, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlandia, Israel, Itali, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Amerika Latin, Lebanon Liberia, Libya, Malawi, Malaysia, Mauritius, Mexico, Timur Tengah, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Amerika Utara, Oman, Palestina, Teluk Persia, Filipina, Polandia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Asia Selatan, Korea Selatan, Asia Tenggara, Afrika Selatan, Spanyol, Sub-Sahara Afrika, Sudan, Sweden, Syria, Tanzania, Thailand, Turki, UAE, Uganda, UK, Ukraina, Amerika Serikat, Afrika Barat, Yaman dan Zambia.[29]

4. Bidang Spesialis The EIU (The Economist Intelegency Unit)

Otomotif, Perbankan, Pembandingan, Bisnis, lingkungan, Tiongkok, Perkotaan, Perubahan iklim, Penelitian dan konsultasi komersial, Komoditas, Analisis Perusahaan, Daya Saing, Barang-barang Konsumen,

[28] The EIU, "*Our Analyst*"http://www.eiu.com/analysts
[29] The EIU, "*Our Analyst*(Country Expertise)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Konsumen, Strategi Perusahaan, Risiko Perusahaan, Risiko Kredit, Keuangan Lintas Lintas Negara dan Investasi, Mata Uang, Layanan data, Demokrasi, Pengembangan, Ekonometrika, perekonomian, Ekonomi, Pendidikan, Pasar berkembang, Ketenagakerjaan, Energi, Lingkungan, Integrasi UE, Solusi berbasis bukti, Layanan Finansial, Keamanan Pangan, forecasting, forecasting dan Analisis Kebijakan, Investasi Langsung Asing, Kebijakan luar negeri, gender, Geopolitik, Ekonomi global, Tren global, Kesehatan, Indeks, Infrastruktur, Hubungan internasional, Perdagangan internasional, Investasi, Keuangan Islam, Tenaga Kerja, Ekonomi Makro, Entri Pasar, Mercosur, Migrasi, Kebijakan Moneter, Minyak, Risiko Operasional, Politik , Pemodelan prediktif, Produktivitas, Kebijakan publik, Dampak regulasi, Penelitian, Risiko, Analisis skenario, Keamanan, Sovereign kredit/risiko, Keberlanjutan, Perpajakan, Teknologi, Telekomunikasi dan IT, Perdagangan.[30]

5. Bahasa yang dikuasai The EIU (The Economist Intelegency Unit)

Bahasa Arab, Bahasa Bulgaria, Bahasa Kanton, Bahasa Cina, Bahasa Ceko, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Gujarati, Bahasa Ibrani, Bahasa Hindi, Bahasa Hongaria, Bahasa Italia, Bahasa Jepang, Bahasa Kiswahili, Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin, Bahasa Portugis, Bahasa Punjabi, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Tamil, Bahasa Urdu

[30] The EIU, "*Our Analyst*(Specialist Subject)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Alamat Kantor *The EIU (The Economist Intelegency Unit)*[31]

- London

  20 Cabot Sq.London, E14 4QW-United Kingdom

  Contact number: Tel: +44 (0) 20 7576 8181

  Email: london@eiu.com

- New York

  750 Third Avenue, 5th Floor New York, NY 10017-United States

  Contact number: Tel: + 1 212 698 9717

  Email: americas@eiu.com

- Hong Kong

  1301 Cityplaza Four 12 Taikoo Wan Road Taikoo Shing-Hong Kong

  Contact number: Tel: + 852 2802 7288

  Email: asia@eiu.com

E. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu cara atau metode dalam menentukan dan pengambilan data. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah teknik probality sampling. Seperti yang disebutkan oleh Nanang Martono dalam buku "Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder" bahwa dalam penelitian kuantitaif teknik sampling yang digunakan adalah probality sampling, dikarenakan datanya terkait dengan

[31] The EIU, "*Contact Us*" https://www.eiu.com/public/marketing/ContactUs.aspx?interest=AUA&returnurl=analysts

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asumsi yang akan diujikan menggunakan alat statistik.[32] Probality sampling (sampel probalitas atau sampel yang berpeluang) adalah teknik sampling yang dapat memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dijadikan bagian dari sampel.[33]

Sampel yang digunakan ketika menggunakan analisis data sekunder dapat tentukan dengan ukuran waktu.[34] Sehingga, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel pada tahun 2010 sampai 2018, yakni berkisar 9 periode dengan data yang di ambil adalah studi kasus kesenjangan gender dan indeks demokrasi di Filipina.

F. Variabel

Variabel adalah sebuah konsep yang bervariasi dan memiliki beberapa nilai tersendiri.[35] Adapun jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *dependent* (variabel bebas) dan variabel *independent* (variabel terikat). Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain dan dapat menghasilkan suatu akibat terhadap variabel yang lain. Sedangkan, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dan dapat diakibatkan oleh variabel yang lain.[36] Variabel bebas dalam peneitian ini diwakili oleh kesenjangan gender dengan indikator partisipasi ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik sedangkan variabel terikatnya adalah indeks demokrasi dengan indikator

[32] Nanang Martono, 153
[33] Nanang Martono, 77
[34] Nanang Martono, 153
[35] Nanang Martono, 59
[36] Nanang Martono, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.

G. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan data yang sudah matang sehingga metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa analisa data skunder (*secondary data*) yang diambil dari dua instansi, yaitu *World Economy Forum (WEF)* untuk kesenjangan gender dan *Economist Intelligence Unit (EIU)* untuk indeks demokrasi.

H. Teknik Analisis Data Penelitian.

Setelah data terkumpul dan dihimpun, maka peneliti selanjutnya menganalisis data. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti berhasil menyimpulkan yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan metode statistik yaitu cara pengolaan data hasil penelitian dengan teknik matematika dalam pengumpulan data hasil penelitian serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menggunakan angka, sehingga subjektifitas dalam penarikan kesimpulan dapat dihindari.

Adapun rumus yang dijadikan sebagai pengolahan data adalah dengan rumus korelasi dengan menggunakan software MS. Excel, Minitab 15, dan SPSS 21 dengan tujuan untuk membuktikan tidak atau adanya hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan gender dan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010-2018. Penggunaan ketiga software tersebut untuk membuktikan keakuratan perhitungan terhadap data agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan data yang akan digunakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

Adapun rumus korelasi yang digunakan adalah rumus korelalsi sederhana dengan metode korelasi yang digunakan adalah *product moment-pearson* rumus korelasi nya dapat dilihat sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum_{xy} - (\sum_x)(\sum_y)}{\sqrt{(N\sum_x 2 - (x)^2)(N\sum_y 2 - (y)^2)}}$$

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y

$\sum xy$ = Jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor-skor variabel y (yaitu: y)

$\sum x^2$ = Jumlah perkuadratan seluruh skor x (yaitu : x^2)

$\sum y^2$ = Jumlah pengkuadratan seluruh skor yang (yaitu : y^2)

Nilai koefisien korelasi Product Moment, sebagai berikut.

Tabel 3.1

Interval Koefisien	**Tingkat Hubungan**
0,00 – 0,19	Sangat rendah / sangat lemah
0,20 – 0,39	Rendah / lemah
0,40 – 0,59	Cukup Kuat / cukup tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,60 – 0,79	Kuat / tinggi
0,80 – 1,00	Sangat kuat / sangat tinggi

Sumber: buku Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar) yang telah disederhanakan.[37]

Analisis korelasi product moment atau korelasi pearson ini digunakan lantaran, data yang diteliti berupa data sekunder dan data berupa rasio. Begitu juga dengan menguji akan validitas data dan menguji akan keterkaitan hubungan antara dua variabel, yakni variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent). Sehingga, nilai koefisien yang dilambangkan dengan huruf "r" ini, dalam vaiditas membandingkan dengan nilai r hitung dan r tabel. Sedangkan, dalam pengujian hippotesis yakni melihat seberapa besar nilai r tersebut, dan adakah hubungan di antara dua variabel tersebut.

Pengertian nilai "r" yakni:

- Jika r = -1 artinya hubungan kedua variabel X dan Y adalah hubungan linear terbalik sempurna. Sehingga, makin besar nilai X maka semakin kecil nilai Y bahkan sebaliknya. Jadi, r = -1 adalah hubungan yang berlawanan atau hubungan yang tidak se arah.
- Jika r = 1 artinya hubungan kedua variabel X dan Y adalah hubungan linear sempurna. Sehingga, makin besar nilai X maka semakin besar

[37] Tukiran Tanireja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar)*(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga nilai Y begitu juga sebaliknya. Jadi, r = 1 adalah hubungan yang se arah.38

Nilai r tabel pada korelasi product moment, sebagai berikut:

Gambar 3.2

Df (N-2)	Satu Arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Dua Arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233

Sumber: dikutip dari web tutorial penelitian[39]

Unit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah periode yang akan diteliti, karena *unit analysis* yang digunakan adalah adalah *single country* yakni Filipina. Data unit nya sekitar 9 periode yakni antara tahun 2010 sampai 2018. Maka nilai tersebaran nya adalah r hitung > r tabel yakni dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 %.

Selain menggunakan r hitung *product moment*, penelitian ini juga menggunakan T-test atau T-score untuk menyimpulkan analisa terhadap hipotesa, apakah H0 diterima atau ditolak. Analisa tersebut dilihat dengan

[38] Tukiran Tanireja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif* , 95
[39] Tutorial Penelitian, "*Download Tabel Statistik"* https://tu.laporanpenelitian.com/2013/08/1.html,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari nilai T hitung kemudian melihat area korelasinya (z-area) tersebut berada pada penerimaan atau penolakan H0. Untuk mempermudah dalam analisa T-Test ini, peneliti menggunakan tools pada program Microsoft Excel buatan Purwo Adi Wibowo dan tools online www.wessa.net[40]

I. Hipotesa

Dalam penelitian ini, peneliti menduga adanya hubungan positif antara kesenjangan gender terhadap indeks demokrasi di Filipina (Ha). Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesa tersebut, data yang diperoleh dari sumber sekunder akan diolah secara statistik dan kemudian dilihat area korelasinya (z-area) berada di daerah penerimaan ataukah penolakan Ho (*null-hypotheses*) dalam diagram kurtosis. Adapun Ho dalam penelitian ini berarti; tidak terdapat hubungan antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di Filipina.

[40] didesain oleh Wessa. *Free Statistics Software, Office for Research Development and Education*, 2019, versi 1.2.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas pada penelitian ini adalah kesenjangan gender, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah indeks demokrasi. Adapun cara mendapatkan data kedua variabel tersebut menggunakan data sekunder. Sehingga, data yang di dapatkan telah di olah oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan dan peneliti disini hanya menyamakan nilai atau data angka menjadi angka rasio yang sama kemudian di analisis menggunakan alat yang sesuai dengan data yang di teliti.

1. Variabel Kesenjangan Gender

Variabel bebas (X) ini berasal dari data *global gender gap* yaitu sebuah lembaga atau instansi yang bernama The WEF (*World Economic Forum*). Peneliti mengambil data sekunder, sehingga data tersebut sudah di olah dan peneliti tidak menggunakan teknik pengambilan data menggunakan kuisioner, angket, observasi maupun wawancara. Data yang diambil yakni selama 9 periode dari tahun 2010 hingga 2018 pada negara Filipina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data variabel bebas (X) ini menggunakan data berskala rasio. Data ini terdiri dari empat indikator dalam penyusunan indeks variabel X. Adapun, empat indikator tersebut yakni:

Tabel 4.1

Indikator variabel X	Partisipasi ekonomi	Tingkat pendidikan	Kesehatan dan kelangsungan hidup	Pemberdayaan politik

Sumber: *Global gender gap* oleh The WEF.

Berikut data kesenjangan gender di Filipina pada tahun 2010 sampai 2018.

Tabel 4.2

Tahun	**Peringkat**	**Skor Keseluruhan**	**Partisipasi Ekonomi**	**Tingkat Pendidikan**	**Kesehatan Dan Kelangsungan Hidup**	**Pemberdayaan Politik**
2010	9	0.7654	0.7611	1.0000	0.9796	0.3212
2011	8	0.7685	0.7632	1.0000	0.9796	0.3314
2012	8	0.7757	0.7719	1.0000	0.9796	0.3515
2013	5	0.7832	0.7773	1.0000	0.9796	0.3760
2014	9	0.7814	0.7780	1.0000	0.9796	0.3682
2015	7	0.790	0.799	1000	0.980	0.382
2016	7	0.786	0.780	1000	0.980	0.386
2017	10	0.790	0.764	1000	0.979	0.416
2018	8	0.799	0.801	1.000	0.979	0.416

Sumber: data *Global gender gap* dari tahun 2010-2018 oleh The WEF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder yang telah di olah dari instansi berbentuk skala rasio dan yang digunakan adalah skor keseluruhan. Kemudian, disamakan antara variabel X dan variabel Y. Membuat persamaan antara dua variabel tersebut yakni dengan menyederhanakan angka, angka tersebut disamaratakan. Peneliti menyederhanakannya dengan Microsoft Excel yakni membulatkan menjadi 2 desimal agar antara variable X dan variabel Y mememiliki rasio yang sama.

Tabel 4.3

Tahun	**Skor keseluruhan**	**Skor yang telah diolah**
2010	0.7654	0,77
2011	0.7685	0,77
2012	0.7757	0,76
2013	0.7832	0,78
2014	0.7814	0,78
2015	0.790	0,79
2016	0.786	0,79
2017	0.790	0,79
2018	0.799	0,80

Sumber: data yang telah diolah dari kesenjangan gender.

2. Variabel Indeks Demokrasi

Variabel terikat (Y) ini berasal dari data *democracy index* penelitian milik The EIU (*The Economist Intelligence Unit*). Peneliti mengambil data sekunder, sehingga data tersebut sudah di olah dan peneliti tidak menggunakan teknik pengambilan data menggunakan kuisioner, angket,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi maupun wawancara. Data yang diambil yakni selama 9 periode dari tahun 2010 hingga 2018 pada negara Filipina.

Data variabel terikat (Y) ini menggunakan data berskala rasio. Data ini terdiri dari lima indikator dalam penyusunan indeks variabel Y. Adapun, lima indikator tersebut yakni:

Tabel 4.4.

Indikator variabel Y	Pluralisme	Fungsi pemerintahan	Partisipasi politik	Budaya politik	Kebebasan sipil

Sumber: *democracy index oleh The EIU (The Economist Intelligence Unit)*

Berikut data indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 sampai 2018.

Tabel 4.5

Tahun	**Peringkat**	**Skor keseluruhan**	**Pluralisme**	**Fungsi pemerintahan**	**Partisipasi politik**	**Budaya politik**	**Kebebasan sipil**
2010	74	6.12	8.33	5.00	5.00	3.13	9.12
2011	75	6.12	8.33	5.00	5.00	3.13	9.12
2012	69	6.30	8.33	5.36	5.56	3.13	9.12
2013	66	6.41	8.33	5.36	6.11	3.13	9.12
2014	53	6.77	8.33	5.36	6.67	4.38	9.12
2015	54	6.84	8.33	5.71	6.67	4.38	9.12
2016	50	6.94	9.17	5.71	7.22	4.38	8.24
2017	51	6.71	9.17	5.71	7.22	4.38	7.06
2018	53	6.71	9.17	5.71	7.22	4.38	7.06

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: *democracy index oleh The EIU (The Economist Intelligence Unit)* dari tahun 2010-2018

Tabel 4.6

Tahun	**Skor keseluruhan**
2010	6.12
2011	6.12
2012	6.30
2013	6.41
2014	6.77
2015	6.84
2016	6.94
2017	6.71
2018	6.71

B. Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum melanjutkan pada tahap menginterprestasi data menuju ke pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan tahap persyaratan analisis dengan melukan uji normalitas data. Karena, peneliti menggunakan korelasi *product moment* maka bentuk asumsi klasik nya berupa uji normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menguji data variabel X ataupun variabel Y dengan prosedur analisis parametik (untuk menguji data yang berdistribusi normal). Jika data berdistribusi normal, maka penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melanjutkan pengujian pada tahap selanjutnya dengan menggunakan korelasi *Pearson*, yakni sesuai dengan metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam penelitian ini, untuk mempermudah dalam menguji normalitas data antara variabel X dan Y peneliti menggunakan tools online www.wessa.net[1]

Dimana dalam menguji normalitas adalah dengan menggabungkan data nilai antara variabel X dengan variabel Y pada tools online tersebut sehingga memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.7

Variabel X	**Variabel Y**
0.77	6.12
0.77	6.12
0.76	6.30
0.78	6.41
0.78	6.77
0.79	6.84
0.79	6.94
0.79	6.71
0.80	6.71

[1] Di desain oleh Wessa, *Free Statistics Software, Office for Research Development and Education*, 2019, versi 1.2.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Normality Tests

Tabel 4.8

jarque.x	**jarque.y**
Jarque-Bera Normality Test data: x JB = 0.42011, p-value = 0.8105 alternative hypothesis: greater	Jarque-Bera Normality Test data: y JB = 0.93217, p-value = 0.6275 alternative hypothesis: greater

Tabel 4.9

ad.x	**ad.y**
Anderson-Darling normality test data: x A = 0.31012, p-value = 0.4865	Anderson-Darling normality test data: y A = 0.44373, p-value = 0.2171

Gambar 4.1

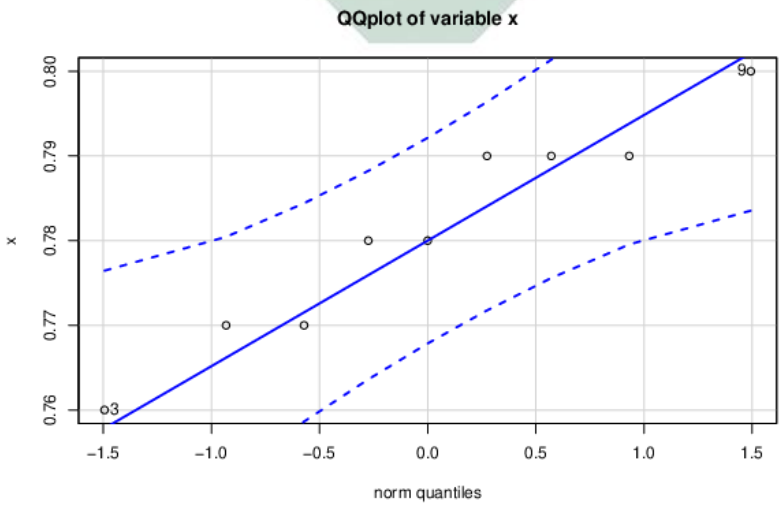

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2

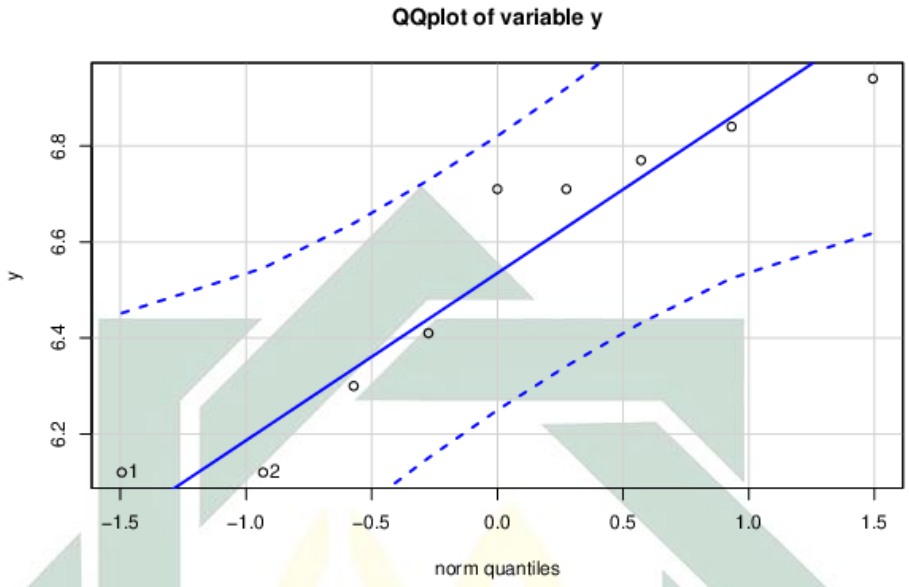

Keterangan:

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data antara variabel X dan variabel Y, dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebaran pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 menunjukkan data bersifat normal sehingga data dapat diteruskan pada tahap selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi r dan T test untuk menentukan kesimpulan hipotesa.

2. Nilai koefisien korelasi (r) pada variabel X dan variabel Y

Untuk mengetahui koefisien korelasi (r) pada variabel X dan variabel Y, peneliti menggunakan analisis korelasi sederhana menggunakan alat analisis korelasi *product moment-pearson*. Dengan menjadikan data sekunder sebagai variabel X dan variabel Y. Uji ini menggunakan aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

softwere SPSS 21, apikasi softwere Minitab 15 dan yang terakhir yakni Micrososft Excell.

Dari pengujian koefisien korelasi (r) didapat data nilai sebagai berikut:

Gambar 4.3

DATA PERHITUNGAN MENGGUNAKAN SPSS 21

Correlations

		gender	demokrasi
gender	Pearson Correlation	1	.792**
	Sig. (1-tailed)		,005
	N	9	9
demokrasi	Pearson Correlation	.792**	1
	Sig. (1-tailed)	,005	
	N	9	9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Gambar 4.4

DATA PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MINITAB 15

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

Correlations: gender. democrasi

Pearson correlation of gender and democrasi = 0,792
P-Value = 0,005

Tabel 4.10

Data perhitungan menggunakan Microsoft Excell

Unit	Variabel X	Variabel Y
2010	0,77	6,12
2011	0,77	6,12
2012	0,76	6,3
2013	0,78	6,41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014	0,78	6,77
2015	0,79	6,84
2016	0,79	6,94
2017	0,79	6,71
2018	0,80	6,71

Microsoft Excell, data perhitungannya tersebut menggunakan Formula =CORREL(A2:A10;C2:C10) adapun, huruf dan angkanya sesuai dengan peneletakkan posisi indeks yang ditulis. Cara mengoprasikannya setelah kedua variabel X dan variabel Y disamaratakan angka desimalnya sebesar yaitu cukup dibulatkan menjadi angka yang sama. Jika telah dihitung formulanya maka hasilnya juga sama dengan beberapa alat uji analisis softwere SPSS 21 dan Minitab 15 yaitu nilai korel koefesien sebesar 0,792. Sedangkan pada perangkat lunak pada SPSS 21 terdapat tanda bintang 2 pada nilai koefisien korelasi 0,792** yang berrarti bahwa tingkat probabilitasnya sangat tinggi sehingga tingkat sinifikansinya sangat tinggi.

Untuk menyimpulkan data r hitung diperlukan data r tabel dalam menentukan perbadingan antara hasil koefesien r hitung dan koefisien r tabel. Oleh karena itu peneliti akan menyajikan r tabel sebagai validitas data. Berikut daftar rangkaian r tabel:

Tabel 4.11

df	**Satu Arah**				
(N-2)	**0.05**	**0.025**	**0.01**	**0.005**	**0.0005**
	Dua Arah				
	0.1	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.001**
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233

Dari data di atas, dapat ditetapkan bahwa df=N-2 =9-2=7. Dengan begitu dapat ditemukan bahwa r tabel satu arah dengan tingkat signifikan 0,05 sebesar 0,5822 dibulatkan menjadi 0,582 dan tingkat signifikan 0,01 sebesar 0,7498 dibulatkan menjadi 0,750.

Dengan hal ini, secara keseluruhan data koefesien korelasi (r) dapat disederhanakan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis

Variabel	**Unit**	**Koefisien Korelasi**	**r tabel**		**r hitung**	**Sig.**
			5%	**1%**		
X dan Y	9	0,792	0,582	0,750	0,792	0,005

Pada tabel di atas menginterprestasikan bahwa koefisien korelasi variabel X dan Y (r_{xy}) memiliki nilai koefisien sebesar 0,792 sehingga diartikan bahwa korelasi ini memiliki tingkat yang tinggi atau kuat berdasarkan interval 0,60 – 0,79 (lihat tabel 3.1 pada BAB III) , yakni tabel koefisien korelasi. Dan juga di artikan bahwa koefisien korelasi ini bernilai postif (ditandai dengan ** serta tidak terdapat tanda – (minus)) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna bahwa terdapat hubungan positif dan searah. Jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Y juga tinggi.

3. Uji Signifikansi

Pada penelitian ini pengujian signifikansi dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel (r hitung > r tabel) dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau sebesar 5 %. Pada tabel 4.12 di atas sudah tersaji nilai r hitung sebsar 0,792 sedangkan r tabel nya sebesar 0,582, maka menunjukkan r hitung > r tabel (0,792 > 0,582) dengan selisih 0,21 sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dengan begitu antara kesenjangan gender dan indeks demokrasi terdapat hubungan yang kuat / tinggi.

Dan jika diinterprestasikan koefisien diterminasi nya (hasil kuadrat dari koefisiaen korelasi), maka didapat:

Koefisien korelasi = 0,792 (dibulatkan menjadi 0,79)

Koefisien determinasi = $0,79^2$ $\longrightarrow$ 0,6241 atau 62,41%

Kesimpulannya adalah variasi kesenjangan gender memberikan kontribusi pada indeks demokarsi sebesar 62,41%.

C. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan jawaban sementara peneliti terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Pada kesimpulan sementara terhadap nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,792 > 0,582) pada taraf 5% dan sig.(1-tailed) <

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

α (0,005 < 0,05) secara statistik sudah menunjukkan kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.

Namun untuk memastikan hipotesis antara H0 dan Ha diterima atau tidak juga perlu uji T-Test dan melihat arah korelasinya (T-area). Untuk mengetahui data yang diperoleh antara variabel X dan Varibel Y, peneliti menggunakan tools wessa.net dan menemukan T-Test sebesar 3.43197106494193 (dibulatkan 3,432).

Gambar 4.5

Pearson Product Moment Correlation - Ungrouped Data

Statistic	Variable X	Variable Y
Mean	0.781111111111111	6.54666666666667
Biased Variance	0.00014320987654321	0.0875111111111111
Biased Standard Deviation	0.0119670329047434	0.29582276976445
Covariance	0.00315416666666667	
Correlation	0.791979665797636	
Determination	0.627231791036935	
T-Test	3.43197106494193	
p-value (2 sided)	0.0109558642408967	
p-value (1 sided)	0.00547793212044835	
95% CI of Correlation	[0.269725961366313, 0.954213075030184]	
Degrees of Freedom	7	

Setelah menemukan nilai T-Test (T-score), kemudian peneleti memasukkan data nilai tersebut pada tools pengujian hipotesis dalam program Microsoft excel yang didesain oleh Purwo Adi Wibowo yang menunjukkan arah positif dan H0 ditolak dengan demikian Ha diterima.

Gambar 4.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

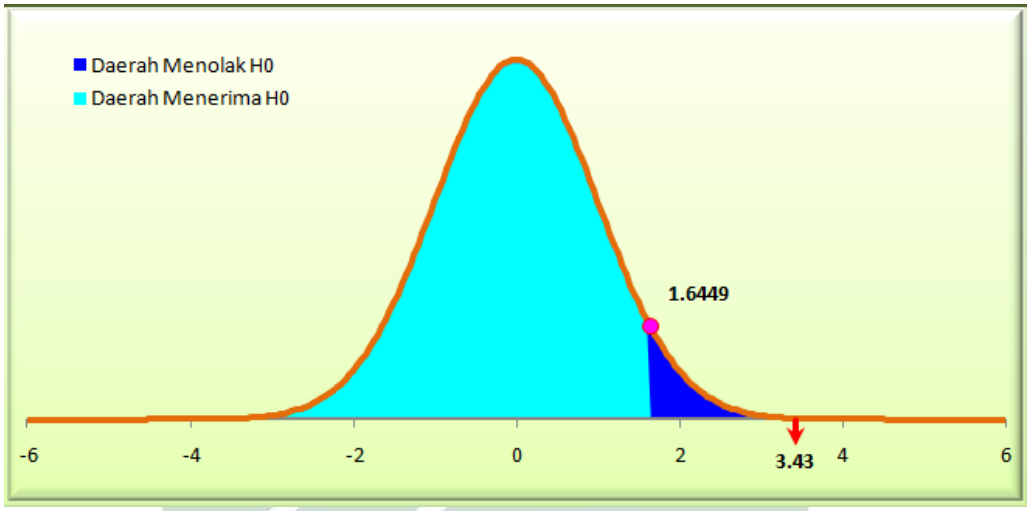

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 – 2018.

D. Pembahasan hasil penelitian

Hasil rangkuman penelitian disimpulkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

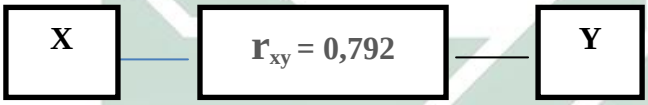

Menurut hasil analisis korelasi *product moment*, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kesenjangan gender (variabel X) dan indeks demokrasi (variabel Y). Dari kelima alat perhitungan tersebut[2] didapat sebuah simpulan yang dibuktikan dengan nilai r (corellation) sebesar 0,792. Sedangkan, dari data r tabel dengan jumlah N=9 menunjukkan 0,582 (telah dibulatkan) yang menunjukkan bahwa r hitung > r tabel (0,792 > 0,582) serta T-area pada nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak

[2] MS. Excel, Minitab 15, SPSS 21, tools online www.wessa.net, dan tools uji hepotesa – Purwo Ali Wibowo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan H1 diterima dengan begitu antara kesenjangan gender dan indeks demokrasi terdapat hubungan yang tinggi / kuat. Karena, koefisien 0,792 dan T-area bernilai positif maka hubungan korelasinya bersifat searah yakni semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi pula variabel Y dengan koefisien determinasi sebesaar 62,41% yang berarti variasi kesenjangan gender memberikan kontribusi pada indeks demokrasi. Variasi tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Filipina pada peringkat 50 dari 163 negara menunjukkan pada taraf indeks demokrasi yang tidak terlalu buruk.

Hasil penelitian ini mempunyai arti bahwa kesenjangan gender berpengaruh terhadap indeks demokrasi di Filipina. Adanya bentuk kesenjangan gender yang baik bahkan mendekati kesetaraan gender sangat berhubungan dengan tingkat dan indeks demokrasi di Filipina. Seperti yang telah disebutkan dalam pidato Michelle bahwa kesetaraan gender adalah bagian demokrasi juga. Hal ini dapat dijadikan suatu acuan dan rujukan kepada negara dan pemerintah Filipina untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti permasalahan terhadap demokrasi pada negara tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesenjangan gender maka semakin tinggi indeks demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh data r hitung lebih besar dari pada r tabel sebesar 0,792 > 0,582 pada taraf signifikan 5%, serta pada perhitungan T-area menunjukkan satu arah positif dengan H0 ditolak. Jika H0 ditolak maka Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesenjangan gender (variabel X) dan indeks demokrasi (variabel Y) di Filipina pada tahun 2010 – 2019 dengan nilai koefisiensi korelasi (r_{xy}) sebesar 0,792 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5 %. Adapun hubungan di antara kesenjangan gender dan indeks demokrasi di Filipina pada tahun 2010 – 2019 tersebut berkategori tinggi / kuat pada nilai interval antara 0,60 – 0,79 dengan variasi kesenjangan gender memberikan konstribusi pada indeks demokrasi sebesar 62,41. Variasi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Filipina pada peringkat 50 dari 163 negara menunjukkan pada taraf indeks demokrasi yang tidak terlalu buruk.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas pada penelitian ini, terdapat beberapa saran sebaai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hubungan antara kesenjangan gender dengan indeks demokrasi di Filipina terdapat hubungan yang positif-searah dan masuk dalam kategori tinggi / kuat. Namun, kenyataan yang terjadi di Filipina justru sebaliknya yaitu kesenjangan gender yang tinggi tidak menjadikan negara ini menjadi demokrasi yang tinggi akan tetapi menjadikan indeks demokrasi yang lemah bahkan rendah. Maka, diharapkan kepada pemerintah atau negara yang bersangkutan dapat mengevaluasi dengan keadaan demokrasi di Filipina.
2. Penelitian ini masih terbatas hanya variabel kesenjangan gender dan indeks demokrasi saja, adapun disarankan bagi peneliti lain atau selanjutnya agar dapat mengetahui apa saja faktor-faktor indeks demokrasi yang tinggi. Karena, sejatinya, bukan hanya kesenjangan gender saja yang mempengaruhi indeks demokrasi (meski berhubungan kuat / tinggi). Tetapi, juga faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Beer, Carolline. "*Democracy and Gender Equality"* (DOI 10.1007/s12116-009-9043-2: Januari 2015).

Daniels Michael. "The Gender *Gap"*, https://hcli.org/articles/gender-gap-what-asia-can-learn-philippines, di akses 10 Desmber 2018.

_____. "The Gender *Gap*: *What Asia Can Learn From The Philippines"*, https://hcli.org/articles/gender-gap-what-asia-can-learn-philippines, di akses 9 Desmber 2018.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baegaqi Arif. *Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional*; *Demokrasi* (Universitas Ahmad Dahlan; 2012).

EIU. "*Democracy Index 2017 Free Speech Under Attack"*.

_____. "*Contact Us*" https://www.eiu.com/public/marketing/ContactUs.aspx?interest=AUA&returnurl=analysts

_____. "*Democracy Index 2015 Democracy In An Age Of Anxiety"*.

_____. "*Democracy Index 2016 Revenge Of The "Deplorables* ".

_____. "*Introduction*"http://www.eiu.com/home.aspx#about

_____. "*Our Analyst*(Country Expertise)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. "*Our Analyst*(Specialist Subject)"

_____. "*Our Analyst*"http://www.eiu.com/analysts

_____. *Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation, Protest And Democracy*.

Ekawati, Esty. *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral* (Jakarta: Puskapol FISIP UI, 2013).

Funk, Patricia. "*Gender Gaps in Policy Making: Evidence from Direct Democracy in Switzerland"(*Stanford University: 2008).

G Timberman, David. "*A Changeless Land: Continuity and Change in Philippine Politics*" (M.E. Sharpe: 1991), 27, https://www.worldcat.org/title/changeless-land-continuity-and-change-in-philippine-politics/oclc/1031486222, di akses 12 Desember 2018.

Ikbar, Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Agustus 2014).

Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis data Sekunder*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Alami, Athiqoh. "*Mengapa Gender Menjadi Isu Penting dalam Hubungan Internasional?",* http://www.politik.lipi.go.id/kolom/176-mengapa-gender-menjadi-isu-penting-dalam-hubungan-internasional,

Penelitian, Tutorial. "*Download Tabel Statistik"* https://tu.laporanpenelitian.com /2013/08/1.html.

Rahmat, Taufiq. "Jurgen Habermas : Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik", https://www.kompasiana.com/taurahida/550d50348133115922b1e277 /jurgen-habermas-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik.

Souad, Sar. "*Women's Political Representation In The Philippines –A Study About Gender Equality In The Government Of The Philippines"* (Hogskolan I Boras: 2017)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitif, Kuantitafi dan R&D.* (Bandung: CV Alfabeta,2011).

Suryorini, Ariana. "*Menelaah Feminisme Dalam Islam"*(Volume 7, Nomor 2, April 2012).

Tanireja, Tukiran. Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar).* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)

WEF. " *The Global Gender Gap Report 2017,* (Switzerland: 2017)", 14

_____. "*Leadership and Governance*" https://www.weforum.org/about/ leadership-and governance

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. "*The Global Gender Gap Report 2017*" (Switzerland: 2015), 16

_____. "*The Global Gender Gap Report 2017*" (Switzerland: 2017), 10

_____. "*A Partner in Shaping History - The First 40 Years".* https://www.weforum.org/about/history.

_____. "*Our Impact Improving the state of the world"* https://www.weforum.org/our-impact

_____. "*Our Members and Partners*" https://www.weforum.org/about/our-members-and-partners

_____. "*Our Mission The World Economic Forum*"https://www.weforum.org/about/worldeconomic-forum

Women, Un. *Democracy and Gender Equality*, http://www.unwomen.org/en/news/astories/2011/5/democracy-and-gender-equality, di akses 9 Desember 2018

Worldometers, "Population of the Philippines (2019 and historical) ",http://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/, di akses 24 Februari 2019

Y Geeronemo, Jee. "*PH still among 10 most gender-equal nations"*, https://www.rappler.com/nation/150307-ph-global-gender-gap-report-2016, di akses 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id